

BAGIAN ANGGARAN 013

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2012

AUDITED

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7
Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021- 5253004 (8 Saluran)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Keuangan
Yang Berakhir Tahun 31 Desember 2012**

audited

**JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7
JAKARTA SELATAN**



DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Pernyataan Telah Direviu	viii
Ringkasan	ix
I Laporan Realisasi Anggaran (Perbandingan 2012 dan 2011)	xi
II Neraca	xii
III Catatan atas Laporan Keuangan	1
A Penjelasan Umum	1
A.1 Dasar Hukum	1
A.2 Kebijakan Teknis Kementerian Hukum dan HAM	1
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4 Kebijakan Akuntansi	5
A.5 Kebijakan Akuntansi Basis Akrua	10
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah	10
B.2.2 Belanja Negara	14
C Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	23
C.2.1 Aset Lancar	23
C.2.2 Aset Tetap	40
C.2.3 Piutang Jangka Panjang	46
C.2.4 Kewajiban	51
C.2.5 Ekuitas	55
D Pengungkapan Penting Lainnya	56
D.2.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	56
D.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua	56
D.2.3 Pengungkapan Lain-lain	56
Laporan-laporan Pendukung :	
LRA Belanja	
LRA Pengembalian Belanja	
LRA Pendapatan	
LRA Pengembalian Pendapatan	
Laporan Barang Pengguna	
Daftar Rekening Pemerintah	
Lain-lain	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 vs 2011	vii
Tabel 2 Ringkasan Neraca 31 Desember 2012 vs 2011	viii
Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA Kementerian Hukum dan HAM	5
Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang	9
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan HAM TA 2012	10
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011	11
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Penjualan dan Sewa	11
Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa	12
Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga	12
Tabel 10 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kejaksaan, Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	12
Tabel 11 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda	13
Tabel 12 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain	13
Tabel 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	15
Tabel 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I (Organisasi)	15
Tabel 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Fungsi	15
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 vs 2011	16
Tabel 17 Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2012	17
Tabel 18 Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang TA 2012	17
Tabel 19 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Belanja Barang Operasional	18
Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Belanja Barang Non Operasional	18
Tabel 21 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Jasa	18
Tabel 22 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan	19
Tabel 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Perjalanan Biasa	19
Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Perjalanan Biasa – Luar Negeri	19
Tabel 25 Rincian Realisasi Belanja Modal DIPA TA 2012	20
Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah	20
Tabel 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20

Tabel 28	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21
Tabel 29	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jaringan	21
Tabel 30	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21
Tabel 31	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Non Kas	22
Tabel 32	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dan Status Penyetorannya Ke Kas Negara	23
Tabel 33	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri dan Status Penyetorannya Ke Kas Negara	26
Tabel 34	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dan Status Penyetorannya Ke Kas Negara	28
Tabel 35	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	29
Tabel 36	Rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	30
Tabel 37	Rincian Potensi Piutang	32
Tabel 38	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	34
Tabel 39	Rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Netto	35
Tabel 40	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	36
Tabel 41	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	37
Tabel 42	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR - Netto	38
Tabel 43	Perbandingan Nilai Persediaan per 31 Desember TA 2012 dan 2011	39
Tabel 44	Rincian Perjenis Persediaan 31 Desember 2012 dan 2011	39
Tabel 45	Perbandingan Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2012 dan 2011	40
Tabel 46	Perbandingan Aset Tanah per 31 Desember TA 2012 dan 2011	41
Tabel 47	Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah TA 2012	41
Tabel 48	Perbandingan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember TA 2012 dan 2011	42
Tabel 49	Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2012	42
Tabel 50	Perbandingan Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2012 dan 2011	43
Tabel 51	Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2012	43
Tabel 52	Perbandingan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember TA 2012 dan 2011	44
Tabel 53	Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2012	44
Tabel 54	Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember TA 2012 dan 2011	45
Tabel 55	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2012	45
Tabel 56	Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2012	46



Tabel 57	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	47
Tabel 58	Rincian Tagihan TP/TGR (Netto)	48
Tabel 59	Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 2011	50
Tabel 60	Perbandingan Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011	51
Tabel 61	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012	51
Tabel 62	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga di Lingkungan Kemenkumham Berdasarkan Jenis	52
Tabel 63	Rincian Uang Muka dari KPPN	52
Tabel 64	Rincian Hibah Langsung Kas Per 31 Desember 2012	58
Tabel 65	Rincian Hibah Langsung Kas Per 31 Desember 2012	58
Tabel 66	Rincian Aset Bersejarah Kemenkumham Tahun 2012	58



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari :
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TAHUN ANGGARAN 2012**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM untuk tahun Anggaran 2012 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan lain yang terkait. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Hukum dan HAM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, kehandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pengklasifikasian transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 28 Pebruari 2013

PLT. INSPEKTUR JENDERAL *h*



Dr. WICIPITO SETIADI, SH, HM
NIP. 19560911 198303 1 001

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp2.369.038.381.928,00** atau mencapai **117,77** persen dari estimasi pendapatan sebesar **Rp2.011.659.696.467,00**.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar **Rp6.227.246.372.641,00** atau mencapai **89,28** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp6.975.210.641.000,00**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

Uraian	TA 2012			TA 2011
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PNBP	2.011.659.696.467,00	2.369.038.381.928,00	117,77	2.127.422.991.298,00
Belanja	6.975.210.641.000,00	6.227.246.372.641,00	89,28	6.374.791.990.035,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Jumlah Aset per 31 Desember 2012 adalah sebesar **Rp21.353.680.972.980,00** yang terdiri dari *Aset Lancar* sebesar Rp380.233.910.735,00; *Aset Tetap* sebesar Rp20.619.401.370.243,00; dan *Aset Lainnya* sebesar Rp354.045.692.002,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2012 adalah sebesar **Rp70.490.851.884,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah **Ekuitas Dana** per **31 Desember 2012** adalah sebesar **Rp21.283.190.121.096,00** yang terdiri dari *Eksuitas Dana Lancar* sebesar Rp309.743.058.851,00 dan *Ekuitas Dana Investasi* sebesar Rp20.973.447.062.245,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2
Ringkasan Neraca 31 Desember 2012 dan 2011

	31 Des 2012	31 Des 2011	Naik/Turun	
Aset :				
Aset Lancar	380.233.910.735	305.140.145.478	75.093.765.257	24,61
Aset Tetap	20.619.401.370.243	18.286.914.269.929	2.332.487.100.314	12,75
Aset Lainnya	354.045.692.002	268.189.953.443	85.855.738.559	32,01
Jumlah Aset	21.353.680.972.980	18.860.244.368.850	2.493.436.604.130	13,22
Kewajiban :				
Kewajiban Jangka Pendek	70.490.851.884	82.855.433.121	(12.364.581.237)	(14,92)
Ekuitas Dana :				
Ekuitas Dana Lancar	309.743.058.851	222.284.712.357	87.458.346.494	39,35
Ekuitas Dana Investasi	20.973.447.062.245	18.555.527.787.421	2.417.919.274.824	13,03
Jumlah Ekuitas Dana	21.283.190.121.096	18.777.812.499.778	2.505.377.621.318	13,34
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	21.353.680.972.980	18.860.667.932.899	2.493.013.040.081	13,22

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.



Laporan Realisasi Anggaran

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2012	REALISASI 2012	(%)	REALISASI 2011
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.2.1				
3	Pendapatan Negara Sumber Daya Alam		-	-	-	-
4	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		-	-	-	-
5	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1	2.011.659.696.467,00	2.369.038.381.928,00	117,77	2.127.422.991.298,00
6	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (3 s/d 5)		2.011.659.696.467,00	2.369.038.381.928,00	117,77	2.127.422.991.298,00
7	Jumlah Pendapatan (6)		2.011.659.696.467,00	2.369.038.381.928,00	117,77	2.127.422.991.298,00
8	BELANJA	B.2.2				
9	BELANJA OPERASI	B.2.2.1				
10	Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	3.232.462.624.600,00	3.109.077.269.730,00	96,18	2.890.996.749.741,00
11	Belanja Barang	B.2.2.1.2	2.754.845.196.900,00	2.272.838.710.306,00	82,50	2.149.969.120.505,00
12	Bunga		-	-	-	-
13	Subsidi		-	-	-	-
14	Hibah		-	-	-	-
15	Bantuan Sosial		-	-	-	-
16	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
17	Jumlah Belanja Operasi (10 s/d 16)		5.987.307.821.500,00	5.381.915.980.036,00	89,89	5.040.965.870.246,00
18	BELANJA MODAL					
19	Belanja Tanah	B.2.2.2	24.544.600.000,00	23.116.502.732,00	94,18	10.525.882.656,00
20	Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.2.2	613.322.839.350,00	499.464.238.677,00	81,44	654.075.066.193,00
21	Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.2.2	328.757.666.000,00	303.660.238.317,00	92,37	663.606.637.711,00
22	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.2.2	5.863.210.000,00	4.106.073.098,00	70,03	4.002.651.200,00
23	Belanja Aset Tetap Lainnya	B.2.2.2	15.414.504.150,00	12.378.974.993,00	80,31	1.615.882.029,00
24	Belanja Aset Lainnya	B.2.2.2	-	-	-	-
25	Belanja Transaksi Non Kas	B.2.2.2	-	2.604.364.788,00	-	-
26	Jumlah Belanja Modal (19 s/d 25)		987.902.819.500,00	845.330.392.605,00	85,57	1.333.826.119.789,00
27	JUMLAH BELANJA (17 + 26)		6.975.210.641.000,00	6.227.246.372.641,00	89,28	6.374.791.990.035,00



Laporan Neraca

31 desember 2012

2. NERACA

NERACA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2012	2011
1	ASET			
2	ASET LANCAR	C.2.1		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	4.905.638.455,00	2.517.872.150,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.1.2	5.804.728.975,00	6.629.895.698,00
5	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.3	20.417.269.305,00	2.155.885.364,00
6	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	C.2.1.4	37.497.955.959,00	18.343.360.446,00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.2.1.5	(12.670.630.903,00)	-
8	<i>Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (netto)</i>	C.2.1.6	24.827.325.056,00	18.343.360.446,00
9	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.7	178.837.498,00	168.980.500,00
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.8	(894.188,00)	-
11	<i>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (netto)</i>	C.2.1.9	177.943.310,00	168.980.500,00
12	Uang Muka Belanja	C.2.1.10		1.005.479.251,00
13	Persediaan	C.2.1.11	324.101.005.634,00	274.318.672.069,00
14	Jumlah Aset Lancar (3+4+5+8+11+12+13)		380.233.910.735,00	305.140.145.478,00
15	ASET TETAP	C.2.2		
16	Tanah	C.2.2.1	11.715.655.610.505,00	9.987.890.512.711,00
17	Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	2.540.006.548.203,00	2.132.594.242.102,00
18	Gedung dan Bangunan	C.2.2.3	5.570.641.029.594,00	5.215.456.871.085,00
19	Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4	161.477.026.260,00	136.860.127.534,00
20	Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5	44.614.453.012,00	24.002.893.923,00
21	Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.6	587.006.702.669,00	790.109.622.574,00
22	Jumlah Aset Tetap (16 s/d 21)		20.619.401.370.243,00	18.286.914.269.929,00
23	ASET LAINNYA	C.2.3		
24	Tagihan TP/TGR	C.2.3.1	1.512.747.503,00	423.564.049,00
25	Penyisihan Tagihan TP/TGR	C.2.3.2	(77.474.849,00)	-
26	Tagihan TP/TGR (netto)	C.2.3.3	1.435.272.654,00	423.564.049,00
27	Aset Tak Berwujud	C.2.3.4	288.291.861.880,00	239.237.022.128,00
28	Aset Lain-Lain	C.2.3.5	64.318.557.468,00	28.952.931.315,00
29	Jumlah Aset Lainnya (26+27+28)		354.045.692.002,00	268.613.517.492,00
30	JUMLAH ASET (14 + 22 + 29)		21.353.680.972.980,00	18.860.667.932.899,00
31				
32	KEWAJIBAN			
33	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.4		
34	Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.4.1	53.795.140.417,00	11.601.007.436,00
35	Pendapatan diterima dimuka	C.2.4.2	-	60.618.001.500,00
36	Uang Muka dari KPPN	C.2.4.3	4.905.638.455,00	2.517.872.150,00
37	Pendapatan yang ditangguhkan	C.2.4.4	11.790.073.012,00	8.108.973.785,00
38	Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.4.5	-	9.578.250,00
39	Jumlah Kewajiban Jk Pendek (34 s/d 38)		70.490.851.884,00	82.855.433.121,00
40	JUMLAH KEWAJIBAN		70.490.851.884,00	82.855.433.121,00
41				
42	EKUITAS DANA			
43	EKUITAS DANA LANCAR	C.2.5		
44	Cadangan Piutang	C.2.5.1	25.005.268.366,00	18.512.340.946,00
45	Cadangan Persediaan	C.2.5.2	324.101.005.634,00	274.318.672.069,00
46	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	C.2.5.3	(53.001.421.876,00)	(11.123.695.116,00)
47	Dana Lancar Lainnya	C.2.5.4	13.638.206.727,00	189.916.707,00
48	Barang/Jasa yang masih harus diterima	C.2.5.5	-	1.005.479.251,00
49	Barang/Jasa yang masih harus diserahkan	C.2.5.6	-	(60.618.001.500,00)
50	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (44 s/d 49)		309.743.058.851,00	222.284.712.357,00
51	EKUITAS DANA INVESTASI	C.2.6		
52	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.6.1	20.619.401.370.243,00	18.286.914.269.929,00
53	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.6.2	354.045.692.002,00	268.613.517.492,00
54	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (52+53)		20.973.447.062.245,00	18.555.527.787.421,00
55	JUMLAH EKUITAS DANA (50 + 54)		21.283.190.121.096,00	18.777.812.499.778,00
56	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (40 + 55)		21.353.680.972.980,00	18.860.667.932.899,00



Catatan atas Laporan Keuangan (C a L K)

III..CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Kebijakan
Teknis*

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

A.2.1 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

A.2.1.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM meliputi :

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM;
2. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM;
3. Organisasi Kementerian Hukum dan HAM.

A.2.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu lembaga Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

A.2.1.3 Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM

Visi Kementerian Hukum dan HAM ialah “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”.

Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ialah “Melindungi Hak Asasi Manusia”.

Tata Nilai:

K	:	Kepentingan Masyarakat
I	:	Integritas
R	:	Responsif
A	:	Akuntabel
P	:	Profesional

Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ialah:

1. menciptakan supremasi hukum;
2. memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

1. pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional;
3. seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
4. seluruh desa sadar hukum;
5. seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak asasinya; dan
6. hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional.

A.2.1.4 Organisasi Kementerian Hukum dan HAM

Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 11 unit pusat dan 33 kantor wilayah.

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan dalam kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Sekretariat Jenderal membawahkan 7 (tujuh) unit Eselon II, yaitu 6 (enam) biro dan 1 (satu) pusat, yaitu:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Perlengkapan;
- d. Biro Keuangan;
- e. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
- f. Biro Umum; dan
- g. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan yang merupakan unsur penunjang dalam kementerian dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

2. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawasan dalam kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri.

3. Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi kementerian yang bersifat teknis serta bertanggungjawab langsung kepada Menteri. Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- b. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- e. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; dan
- f. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

4. Badan

Badan merupakan unsur penunjang dalam kementerian dan bertanggungjawab langsung kepada menteri. Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia; dan
- c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di propinsi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kantor wilayah membawahkan unit pelaksana teknis di lingkungannya dalam hal pengawasan dan jalur koordinasi.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana pelayanan di bidang masing-masing dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari :

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Rumah Detensi Imigrasi;
- c. Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Balai Pemasyarakatan;
- e. Rumah Tahanan Negara;
- f. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- g. Balai Harta Peninggalan (di lima kantor wilayah).

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktur dibawah Kementerian Hukum dan HAM seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggungjawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebesar 779 satuan kerja. Dari jumlah tersebut, satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 779 satker (100%), Rincian satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA Kementerian Hukum dan HAM

No	Eselon I	Jumlah Satker
1	Sekretariat Jenderal,	767
2	Inspektorat Jenderal	1
3	Ditjen Administrasi Hukum Umum	1
4	Ditjen Pemasyarakatan	1
5	Ditjen Imigrasi	1
6	Ditjen Hak Kekayaan Intelektual	1
7	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	1
8	Ditjen Hak Asasi Manusia	1
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	1
10	Balitbang HAM	1
11	Badan Pengembangan SDM	3
Total		779

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah ditetapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka laporan keuangan menurut klasifikasi sumber dana/jenis belanja.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir (apabila diperoleh dengan pembelian), harga standar (apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri), dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya (apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan).

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2012 pada harga perolehan.

Pengakuan aset tetap pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Pengeluaran yang tidak mencakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak keseniaan.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jauh tempo lebih dari satu tahun dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi; hak cipta (*copyright*); paten; *goodwill*; dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana (5) **Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(6) **Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 4. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan perlunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Saru bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Saru bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	- Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

(7) **Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap**

Sampai saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Kementerian Hukum dan HAM belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan

penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.

*Kebijakan
Akuntansi
Berbasis
Akrual*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Kebijakan akuntansi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahunan TA 2012 adalah berbasis akrual namun dibatasi pada akun :

1. Pendapatan yang masih harus dibayar (piutang);
2. Belanja yang masih harus dibayar (hutang)

Sedangkan untuk transaksi dengan akun : Pendapatan Diterima Dimuka dan Belanja Dibayar Dimuka (Uang Muka Belanja) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.KU.05.01-185 tanggal 18 Desember 2012 Tentang Penyajian Aset dan Kewajiban Dalam Neraca Berdasarkan Basis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012.

Bagi satuan kerja yang sebelumnya menerapkan basis akrual disemua akun, telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tersebut diatas. Adapun satuan kerja yang sebelumnya menerapkan basis akrual disemua akun adalah : Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

*Penjelasan
Realisasi
Anggaran*

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah

*Pendapatan
Negara dan
Hibah*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kemenkumham pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp2.369.038.381.928,00 atau mencapai 117,77 persen dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp2.011.659.696.467,00. Nilai ini berbeda dengan nilai berdasarkan aplikasi Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAPA) yang mencatat realisasi PNBPN sebesar Rp2.369.042.434.237,00 atau lebih besar aplikasi sebesar Rp4.052.309,00. Hal ini karena terdapat data ganda pada proses pengiriman data di tingkat SAPA pada Rutan Selayar Kanwil Sulawesi Selatan sebesar Rp4.052.309,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kemenkumham berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan HAM TA 2012

MAP	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa	13.057.595.201	13.587.233.428	104,06%
4232	Pendapatan Jasa	1.996.817.918.266	2.325.240.604.485	116,45%
4233	Pendapatan Bunga	100.000	-	0
4234	Pendapatan Kejaksaan, Peradilan dan Hsl Tindak Pidana Korupsi	-	13.726.500	0
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	-	8.329.198.048	0
4239	Pendapatan Lain-lain	1.784.083.000	21.867.619.467	1225,71%
	Jumlah	2.011.659.696.467	2.369.038.381.928	117,77

Realisasi PNPB TA 2012 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp241.615.390.630,00 atau 11,36 persen dibandingkan TA 2011. Perbandingan realisasi PNPB TA 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2012 dan 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	%
PNBP	2.369.038.381.928	2.127.422.991.298	241.615.390.630,00	11,36%

**Grafik 1. Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak
TA 2012 dan TA 2011**



Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Penjualan dan Sewa

MAK	Pendapatan Penjualan dan Sewa	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	600.000	8.033.735	1.338,96
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	500.000.000	84.072.147	16,81
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetak	-	1.880.000	-
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	-	350.000	-
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	511.989.000	439.351.917	85,81
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung	5.166.000	4.766.000	92,26
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	80.930.000	-
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli	85.000	10.226.024	12.030,62
423124	Pendapatan dari Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	-	50.000	-
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	-	459.000	-
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	320.495.000	1.086.216.000	338,92
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan	5.745.600.201	3.310.991.794	57,63
423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	3.067.300.000	5.938.451.427	193,61
423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	2.090.000	-
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung dan Bangunan	-	2.448.000	-
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	2.906.360.000	2.616.917.384	90,04
	Jumlah	13.057.595.201	13.587.233.428	104,06

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan jasa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa

MAK	Pendapatan Jasa	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	56.000	200.000	357,14
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Uraha Derivatisasi Alam (DUDA)	-	209.910.000	-
423213	Pendapatan Surat Keterangan, VISA, Paspor	1.619.467.854.866	1.866.459.683.653	115,25
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	372.753.070.000	455.898.124.853	122,31
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	-	19.050.000	-
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai	2.884.402.400	1.360.300.066	47,16
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udar,	-	1.047.500	-
423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	1.500.000	-	-
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	63.845.000	109.623.443	171,7
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	10.200.000	283.500.000	2.779,41
423227	Pendapatan Bea Lelang	-	150.000	-
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	1.200.000	-	-
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	1.825.000	-
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	1.635.790.000	897.189.970	54,85
Jumlah		1.996.817.918.266	2.325.240.604.485	116,45

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan bunga disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga

MAK	Pendapatan Bunga	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423321	Pendapatan Gain on Bond atas pembelian obligasi dalam negeri	100.000	-	-
Jumlah		100.000	-	-

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan kejaksaan, peradilan dan hasil tindak pidana korupsi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kejaksaan, Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi

MAK	Pendapatan Bunga	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	-	12.613.000	-
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	-	1.113.500	-
Jumlah		-	13.726.500	-

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan iuran dan denda disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda

MAK	Pendapatan Bunga	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	-	8.329.198.048	-
	Jumlah	-	8.329.198.048	-

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan lain-lain disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 12. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain

MAK	Pendapatan Lain-lain	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423911	Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	8.489.000	5.489.024.638	64.660,44
423913	Pendapatan Kembali Belanja Lainnya TAYL	266.384.000	11.604.045.853	4.356,13
423916	Pendapatan Kembali Belanja Swadana TAYL	-	1.186.900.274	-
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara	1.500.000.000	414.423.734	27,63
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	5.680.000	91.617.668	1.612,99
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	15.295.000	-
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.530.000	3.066.312.300	86.864,37
	Jumlah	1.784.083.000	21.867.619.467	1225,71

Pada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Pendapatan Hak dan Perijinan (423214) yang tercatat dengan menggunakan aplikasi SAK hanya mencatat penerimaan yang dipungut secara langsung satker Ditjen AHU melalui transfer.

Sedangkan PNBPN yang tidak dicatat dengan menggunakan aplikasi adalah PNBPN atas pendapatan yang berasal dari pelayanan jasa hukum di bidang Fidusia, Kenotariatan dan kewarganegaraan yang dipungut oleh masing-masing kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dicatat dalam kode akun 03 dan dianggap sebagai PNBPN Ditjen AHU berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.KU.02.02 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan PNBPN atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di bidang Fidusia, Kenotariatan dan kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Pendapatan yang tidak tercatat dalam SAKPA adalah sebesar Rp8.955.786.645,00 terdiri dari :

a) Pendapatan Hak dan Perijinan (Fidusia dan Notariat) sebesar Rp8.756.286.645,00;

b) Pendapatan Uang Pewarganegaraan sebesar Rp199.500.000,00.

PNBP tersebut diatas tidak dapat dicatat kedalam aplikasi SAKPA Ditjen AHU dikarenakan disetor menggunakan SSBP dengan kode satker kantor wilayah. Sesuai surat rekomendasi dari Badan Penagawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor SPM-1086/D2/02/2011 tanggal 21 Desember 2011, BPKP merekomendasikan agar membuat dua login dalam aplikasi SAKPA yaitu kode I-01 untuk Sekretariat Jenderal dan kode eselon 1-03 untuk Ditjen AHU.

Dengan rekomendasi tersebut, kantor wilayah tidak dapat melakukan rekonsiliasi pendapatan dengan KPPN setempat. Sehingga seluruh pendapatan yang berasal dari pendapatan atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja Negara

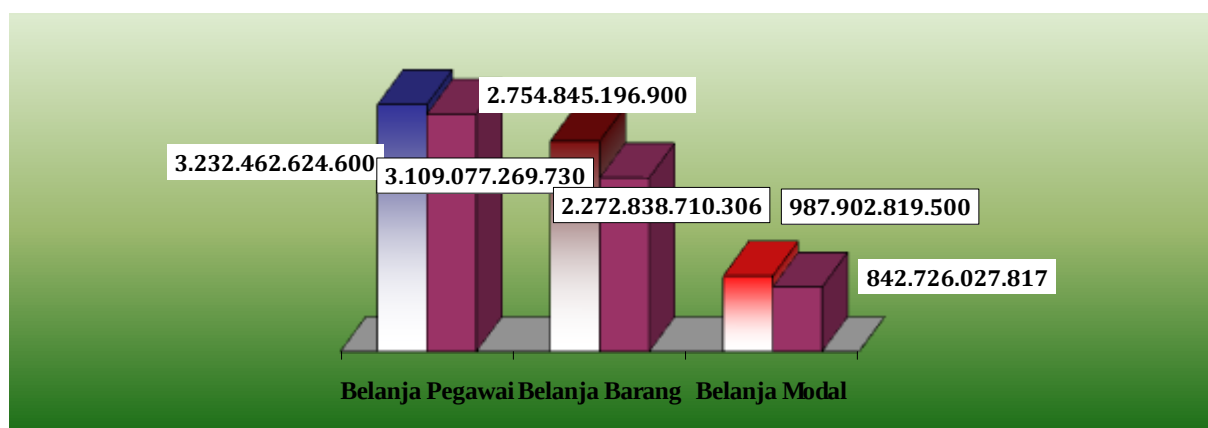
B.2.2 Belanja Negara

Realisasi belanja Kemenkumham RI TA 2012 adalah sebesar Rp6.227.246.372.641,00 terdiri dari realisasi belanja DIPA Kemenkumham sebesar Rp6.224.642.007.853,00 dan belanja non kas sebesar Rp2.604.364.788,00 yang merupakan hibah berupa barang dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja DIPA sebesar Rp6.224.642.007.853,00.

Berikut adalah grafik dan tabel anggaran dan realisasi belanja DIPA Kemenkumham TA 2012 menurut jenis belanja:

Grafik 2. Realisasi Anggaran Belanja TA 2012 Menurut Jenis Belanja



Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
RM			#DIV/0!
Belanja Pegawai	3.232.462.624.600	3.109.077.269.730	96,18
Belanja Barang	2.749.584.151.900	2.267.677.864.523	82,47
Belanja Modal	971.607.084.500	839.880.132.217	86,44
Total	6.953.653.861.000	6.216.635.266.470	89,40

Hibah

Belanja Barang	5.261.045.000	5.160.845.783	98,10
Belanja Modal	16.295.735.000	2.845.895.600	17,46
Total	21.556.780.000	8.006.741.383	37,14

RM dan Hibah

Belanja Pegawai	3.232.462.624.600	3.109.077.269.730	96,18
Belanja Barang	2.754.845.196.900	2.272.838.710.306	82,50
Belanja Modal	987.902.819.500	842.726.027.817	85,30
Total	6.975.210.641.000	6.224.642.007.853	89,24

Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja DIPA Kemenkumham TA 2012 menurut Organisasi (Unit Eselon I) :

Tabel 14. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon 1 (Organisasi)

Eselon 1	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Setjen	5.496.328.696.000	5.030.440.378.535	91,52
Itjen	28.777.871.000	28.060.456.352	97,51
Ditjen AHU	170.669.730.000	159.168.945.723	93,26
Ditjen PAS	82.151.818.000	77.723.996.812	94,61
Ditjen Imigrasi	879.122.468.000	654.084.296.041	74,4
Ditjen HKI	89.179.263.000	77.416.002.853	86,81
Ditjen PP	52.931.701.000	35.310.710.002	66,71
Ditjen HAM	27.484.307.000	26.130.489.314	95,07
B P H N	46.664.761.000	40.365.557.181	86,5
BALITBANG HAM	22.026.679.000	21.199.454.359	96,24
B P S D M	79.873.347.000	74.741.720.681	93,58
Jumlah	6.975.210.641.000	6.224.642.007.853	89,24

Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja DIPA Kemenkumham TA 2012 menurut fungsi :

Tabel 15. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Fungsi

Fungsi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pelayanan Umum	5.712.278.555.000	5.199.424.462.838	91,02
Ketertiban Keamanan	1.236.618.170.000	1.000.833.867.383	80,93
Pendidikan	26.313.916.000	24.383.677.632	92,66
Jumlah	6.975.210.641.000	6.224.642.007.853	89,24

2. Realisasi Belanja Transaksi Non Kas sebesar Rp2.604.364.788,00

Realisasi belanja transaksi non kas merupakan hibah berupa barang dengan rincian dapat dilihat pada tabel 31.

Nilai realisasi belanja LRA sebesar Rp6.227.246.372.641,00 tersebut berbeda dengan nilai realisasi berdasarkan aplikasi SAPA sebesar Rp6.227.249.440.009,00 atau lebih besar aplikasi sebesar Rp3.067.368,00. Hal ini karena terdapat data ganda pada proses pengiriman data di tingkat SAPA pada Kanwil DKI Jakarta sebesar Rp3.067.368,00.

Bila dibandingkan realisasi belanja TA 2011 sebesar Rp6.374.791.990.035,00, realisasi tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp147.545.617.394,00 atau 2,31 persen. Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 vs 2011

Jenis Belanja	2012 (Rp)	2011 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
Belanja Pegawai	3.109.077.269.730	2.890.996.749.741	218.080.519.989	7,54
Belanja Barang	2.272.838.710.306	2.149.969.120.505	122.869.589.801	5,71
Belanja Modal	845.330.392.605	1.333.826.119.789	-488.495.727.184	-36,62
Total	6.227.246.372.641	6.374.791.990.035	-147.545.617.394	-2,31

Belanja Operasi

B.2.2.1 Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi Kemenkumham TA 2012 adalah sebesar Rp5.381.915.980.036,00 atau mencapai 89,89 persen dari anggarannya sebesar Rp5.987.307.821.500,00. Bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama TA 2011 sebesar Rp5.040.965.870.246,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp340.950.109.790,00.

Belanja Pegawai

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Kemenkumham TA 2012 adalah sebesar Rp3.109.077.269.730,00 atau mencapai 96,18 persen dari anggarannya sebesar Rp3.232.462.624.600,00. Nilai ini berbeda dengan nilai berdasarkan aplikasi SAPA yang mencatat realisasi belanja pegawai sebesar Rp3.109.062.289.598,00 atau lebih kecil aplikasi sebesar Rp14.980.132,00. Hal ini karena adanya kesalahan pada proses pengiriman data dimana seharusnya untuk belanja pegawai namun terkirim ke belanja barang sebesar Rp14.980.132,00. Bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama TA 2011 sebesar Rp2.900.486.698.499,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp208.575.591.099,00 atau 7,19 persen. Kenaikan realisasi belanja pegawai ini disebabkan karena adanya kenaikan belanja gaji pokok dan tunjangan seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2012

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.103.152.284.650	2.006.692.915.955	-1.779.158.442	2.004.913.757.513	95,33
5121	Belanja Honorarium	2.976.000.000	2.888.400.000	-	2.888.400.000	97,06
5122	Belanja Lembur	47.192.653.950	44.607.778.550	-176.000	44.607.602.550	94,52
5123	Belanja Vakasi	303.743.000	271.182.000	-	271.182.000	89,28
5124	Belanja Tunjangan	1.078.837.943.000	1.077.662.628.391	-21.266.300.724	1.056.396.327.667	99,89
Jumlah		3.232.462.624.600	3.132.122.904.896	-23.045.635.166	3.109.077.269.730	96,18

Terdapat perbedaan pagu anggaran belanja pegawai *audited* dengan *unaudited*. Hal ini disebabkan karena pada saat penggabungan data kedalam aplikasi SAPA, masih ada kantor wilayah yang pada saat penyusunan laporan keuangan *unaudited* tidak mengecek kembali pagu revisi.

Belanja Barang **B.2.2.1.2 Belanja Barang**

Realisasi belanja barang Kemenkumham TA 2012 adalah sebesar Rp2.272.838.710.306,00 atau mencapai 82,50 persen dari anggarannya sebesar Rp2.754.845.196.900,00. Nilai ini berbeda dengan nilai berdasarkan aplikasi SAPA yang mencatat realisasi belanja barang sebesar Rp2.272.856.757.806,00 atau lebih besar aplikasi sebesar Rp18.047.500,00. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan pada proses pengiriman data dimana seharusnya untuk belanja pegawai namun terkirim ke belanja barang sebesar Rp14.980.132,00 dan data ganda di Kanwil DKI Jakarta sebesar Rp3.067.368,00. Bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama TA 2011 sebesar Rp2.149.969.120.505,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp122.869.589.801,00 atau 5,71 persen. Kenaikan realisasi belanja barang ini disebabkan karena adanya kenaikan belanja perjalanan dinas. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 18. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang TA 2012

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	1.059.100.249.666	942.047.028.624	-346.110.555	941.700.918.069	88,92
5212	Belanja Barang Non Operasional	895.150.796.624	710.031.714.450	-511.727.750	709.519.986.700	79,26
5221	Belanja Jasa	210.129.526.016	167.459.049.862	-147.052.622	167.311.997.240	79,62
5231	Belanja	265.399.150.125	219.664.056.135	-122.219.501	219.541.836.634	82,72
5241	Belanja Perjalanan Dalam	298.974.555.969	228.386.584.385	-9.842.677.044	218.543.907.341	73,1
5242	Belanja	26.090.918.500	17.319.658.305	-1.099.593.983	16.220.064.322	62,17
Total Belanja		2.754.845.196.900	2.284.908.091.761	-12.069.381.455	2.272.838.710.306	82,50

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang operasional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 19. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Belanja Barang Operasional

MAK	Belanja Barang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	123.441.993.670	106.573.111.369	86,33
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	595.521.439.120	565.546.878.615	94,97
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	31.695.149.225	27.383.506.161	86,40
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	14.895.192.805	10.099.324.457	67,80
521115	Belanja Honor Operasional Satker	30.780.845.450	28.021.998.434	91,04
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	262.765.629.396	204.076.099.033	77,66
	Jumlah	1.059.100.249.666	941.700.918.069	88,92

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang non operasional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 20. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Belanja Barang Non Operasional

MAK	Belanja Barang Non Operasional	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
521211	Belanja Bahan	127,139,060,664	99,475,609,951	78.24
521212	Belanja Barang Transito	295,250,000	-	-
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	53,294,948,000	41,108,988,500	77.13
521214	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Uang	27,130,000	13,042,505	48.07
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	714,394,407,960	568,922,345,744	79.64
	Jumlah	895,150,796,624	709,519,986,700	79.26

Rincian anggaran dan realisasi belanja jasa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 21. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

MAK	Belanja Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
522111	Belanja Langganan Listrik	79,964,352,004	68,201,652,836	85.29
522112	Belanja Langganan Telepon	16,054,822,955	8,547,796,179	53.24
522113	Belanja Langganan Air	13,860,606,747	9,174,305,146	66.19
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa	2,825,941,000	2,021,843,854	71.55
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	1,504,474,310	886,517,004	58.93
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,242,737,000	3,502,210,620	66.80
522141	Belanja Sewa	44,458,005,000	40,519,743,778	91.14
522151	Belanja Jasa Profesi	34,320,849,000	25,360,000,438	73.89
522191	Belanja Jasa Lainnya	11,897,738,000	9,097,927,385	76.47
	Jumlah	210,129,526,016	167,311,997,240	79.62

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 22. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

MAK	Belanja Pemeliharaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117,512,773,645	109,526,298,323	93.20
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3,153,471,000	2,602,508,267	82.53
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78,912,436,980	63,834,667,259	80.89
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,849,713,000	43,066,235,535	66.41
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	438,720,500	175,056,850	39.90
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	532,035,000	337,070,400	63.35
	Jumlah	265,399,150,125	219,541,836,634	82.72

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang perjalanan biasa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 23. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Perjalanan Biasa

MAK	Belanja Perjalanan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	87.165.828.994	72.923.017.435	83,66
524112	Belanja Perjalanan Tetap	159.000.000	144.280.400	90,74
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	211.649.726.975	145.476.609.506	68,73
	Jumlah	298.974.555.969	218.543.907.341	73,10

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang perjalanan biasa – luar negeri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 24. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Perjalanan Biasa – Luar Negeri

MAK	Belanja Perjalanan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	11.363.348.000	8.610.986.253	75,78
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	14.727.570.000	7.609.078.069	51,67
	Jumlah	26.090.918.000	16.220.064.322	62,17

Kemenkumham untuk tahun anggaran 2012 memperoleh hibah langsung berupa uang sebesar Rp5.261.780.000,00 yang digunakan untuk belanja barang dan terealisasi sebesar Rp5.160.845.783,00.

Belanja Modal

B.2.2.2 Belanja Modal

Realisasi belanja modal Kemenkumham TA 2012 adalah sebesar Rp845.330.392.605,00 terdiri dari realisasi belanja DIPA sebesar Rp842.726.027.817,00 dan realisasi transaksi non kas sebesar Rp2.604.364.788,00. Realisasi belanja modal DIPA mencapai 85,30 persen dari anggaran sebesar Rp987.902.819.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 25. Rincian Realisasi Belanja Modal DIPA TA 2012

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
5311	Belanja Tanah	24.544.600.000	23.116.502.732	-	23.116.502.732	94,18
5321	Belanja Peralatan dan Mesin	613.322.839.350	499.498.921.017	-34.682.340	499.464.238.677	81,44
5331	Belanja Gedung dan Bangunan	328.757.666.000	303.768.369.245	-108.130.928	303.660.238.317	92,37
5341	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.863.210.000	4.106.073.098	-	4.106.073.098	70,03
5361	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.414.504.150	12.384.050.993	-5.076.000	12.378.974.993	80,31
Jumlah		987.902.819.500	842.873.917.085	-147.889.268	842.726.027.817	85,30

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal tanah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

MAK	Belanja Tanah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
531111	Belanja Tanah	21.623.784.000	20.697.366.392	95,72
531112	Belanja Pembebasan Tanah	250.000.000	250.000.000	100,00
531114	Belanja Pembuatan Sertifikat Tanah	388.601.000	52.893.340	13,61
531115	Belanja Pengurukan dan Pematangan	2.282.215.000	2.116.243.000	92,73
Jumlah		24.544.600.000	23.116.502.732	94,18

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 27. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

MAK	Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
532111	Belanja Peralatan dan Mesin	607.048.822.350	495.528.325.343	81,63
532113	Belanja Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	53.700.000	49.870.000	92,87
532115	Belanja Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	2.079.000.000	772.895.450	37,18
532116	Belanja Perijinan Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
532117	Belanja Pemasangan Peralatan dan Mesin	406.137.000	389.690.300	95,95
532118	Belanja Perjalanan Peralatan dan Mesin	1.503.700.000	1.202.927.000	80,00
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2.231.480.000	1.520.530.584	68,14
Jumlah		613.322.839.350	499.464.238.677	81,44

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 28. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

MAK	Belanja Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
533111	Belanja Gedung dan Bangunan	267.076.065.000	246.460.084.588	92,28
533113	Belanja Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	46.879.750	17.778.000	37,92
533115	Belanja Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	498.995.250	446.976.000	89,58
533118	Belanja Perjalanan Gedung dan Bangunan	54.280.000	49.780.000	91,71
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	61.081.446.000	56.685.619.729	92,80
	Jumlah	328.757.666.000	303.660.238.317	92,37

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, jembatan dan jaringan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 29. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jaringan

MAK	Belanja Jalan, Jembatan dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
534111	Belanja Jalan dan Jembatan	144.075.000	136.962.000	95,06
534131	Belanja Jaringan	2.231.794.000	2.182.565.315	97,79
534133	Belanja Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	6.000.000	5.250.000	87,50
534134	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	2.719.285.000	1.076.061.060	39,57
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	762.056.000	705.234.723	92,54
	Jumlah	5.863.210.000	4.106.073.098	70,03

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 30. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

MAK	Belanja Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
536111	Belanja Lainnya	13.814.779.150	10.793.999.993	78,13
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.599.725.000	1.584.975.000	99,08
	Jumlah	15.414.504.150	12.378.974.993	80,31

Adapun, rincian realisasi belanja non kas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 31. Rincian Realisasi Belanja Modal Non Kas

No	Satker	Donor	Jenis Barang	Nomor Register	BAST	
					No. BAST	Nilai (Rp)
1	Ditjen PAS	Asia Pacific Forum	Aplikasi	72298801	PAS-HM.04.03-42	974,100,000
2	Kanwil Jambi	Pemkab Kerinci	Tanah	72580201	W.20.PL.04.01-1155	933,620,000
3	Rudenim Semarang	Intert Org Migration	Gedung dan Bangunan	72595701	W.9.Lr.PL.02.01-041	12,580,000
4	Lapas Narkotika Cirebon	Gereja Bethel Indonesia	Gedung dan Bangunan	72851901	BA. 23.6.2012	44,500,000
5	Ditjen HAKI	ICITAP	Aplikasi	73399501	GA.24042012	104,947,288
6	Kanim pati	Rakha Sukma	Gedung dan Bangunan	72714001	GA.06.01.2012	84,608,500
7	Ditjen HAKI	ICITAP	Aplikasi	73400201	GA.01102012	285,705,000
8	Kanwil Sumut	Pemkab Humbang Hasud	Tanah	73415701	883/DPPK-ASET/2012	164,304,000
TOTAL						2,604,364,788

Nilai realisasi anggaran kas dan non kas tersebut telah sama dengan nilai berdasarkan aplikasi SAPA yang mencatat realisasi belanja sebesar Rp845.330.392.605,00. Bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama TA 2011 sebesar Rp1.333.826.119.789,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp488.495.727.184,00 atau 36,62 persen.

Kemenkumham untuk tahun anggaran 2012 memperoleh hibah langsung berupa uang sebesar Rp16.295.735.000,00 yang digunakan untuk belanja dan terealisasi sebesar Rp2.845.895.600,00.

Penjelasan Pos C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**Neraca****C.2.1. ASET LANCAR****Aset Lancar****C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran****Kas di****Bendahara****Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai dan dikelola Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kemenkumham per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp4.905.638.455,00 dan per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.517.872.150,00. Jika dilihat dari saldo 2011, maka per 31 Desember 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp2.387.766.305,00 atau 94,83 persen. Berikut rincian unit eselon I di lingkungan Kemenkumham yang masih memiliki saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan status pengembaliannya ke Kas Negara.

Tabel 32 . Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dan Status Penyetorannya ke Kas Negara

No	Kanwil/Eselon I	Saldo	Keterangan
1.	Ditjen Imigrasi	3.477.949.427	Merupakan pengembalian sisa TU TA 2012 dengan rincian sebagai berikut : - TU PNBPN sebesar Rp434.979.591 yang telah disetor ke Kas Negara tanggal 3 Januari 2013 NTPN 0004061015060604; - TU RM sebesar Rp2.700.000.000 yang telah disetor ke Kas Negara tanggal 10 Januari 2013 NTPN 0804061503020000; - TU RM sebesar Rp342.969.836 yang telah disetor ke Kas Negara tanggal 4 Januari 2013 NTPN 0411020215101004.
2.	Ditjen PP	30.714.159	Merupakan sisa TUP TA 2012 telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 2 Januari 2013.
3.	DKI	2.972.000	Merupakan Sisa UP dan TUP 2012 pada Rupbasan Jakarta Barat sebesar Rp2.972.000,00 dan Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Rp200.000.000,00. Sisa kas sebesar Rp2.972.000,00 tersebut telah disetor ke Kas Negara sedangkan sisa kas di RS Cipinang dikoreksi karena adanya kelebihan catat.
4.	Jawa Barat	37.729	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Rupbasan Cirebon. Telah disetor ke Kas Negara tanggal 2 Januari 2013.
5.	Jawa Timur	16.670	Merupakan sisa UP TA 2012 pada satker Kanwil Jawa Timur. Telah disetor ke Kas Negara tanggal 4 Januari 2013.

6.	Nanggroe Aceh Darussalam	50.000	Merupakan Sisa Kas tahun 2010 karena adanya kesalahan operator dalam penginputan terhadap posisi kas. Saldo tersebut sudah disetorkan ke kas negara, dengan NTPN : 1106100915050614 pada tanggal 22 Januari 2013
7.	Sumatera Barat	3.450	Merupakan pengembalian UP TA 2012 sebesar Rp3.450,00 dan telah disetor ke Kas Negara tanggal 02 Januari 2013 dengan No NTPN 0707061408050405
8.	Riau	26.551.000	Merupakan sisa Uang Persediaan TA 2012 dengan rincian sebagai berikut : - Rutan Rengat sebesar Rp25.251.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara tanggal 7 Januari 2013 NTPN 0007040105060510 - Kanim Dumai sebesar Rp1.300.000,00 telah disetor ke Kas Negara tanggal 5 Januari 2013 NTPN 0610040104091513
9.	Kepri	8.676.300	Merupakan Sisa TUP 2012 pada Kanim Tarempa Sebesar Rp. 8.676.300,00. Sisa TUP tersebut telah disetorkan ke Kas Negara (NTPN 0103090812120805, NTB 000000405864 Tanggal 04-01-2013);
10.	Sulawesi Selatan	145.000	Merupakan sisa kas anggaran 2012 pada satker LP Narkotika Sungguminasa sebesar Rp145.000,00 yang berasal dari SP2D GU dan telah disetor Kas Negara.
11.	Sulawesi Utara	12.990.000	Merupakan sisa dari dana TUP Desember 2012 yang terlambat disetorkan pada akhir Desember 2012 pada satker Kanwil Sulawesi Utara dikarenakan bendahara sakit. Sisa kas tersebut baru bisa disetorkan pada tanggal 4 Januari 2013
12.	Nusa Tenggara Timur	185.164	Merupakan sisa uang persediaan TA 2012 dengan rincian sebagai berikut: - Lapas Kupang : Rp7.511,00, disetor ke Kas Negara tanggal 2 Januari 2013 NTPN 0511010306070001; - LP Wanita Kupang Rp380,00, disetor ke Kas Negara tanggal 2 Januari 2013 NTPN 0113110113031210; - Rutan Maumere Rp177.269,00, disetor ke Kas Negara 8 Januari 2013 NTPN 0609000102120816
13.	Papua	2.679.031	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Kanim Jayapura sebesar Rp340.100,00 telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 2

			Januari 2013 NTPN 1501150101000915 dan tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp2.338.931,00 NTPN 0612000705050611.
14.	Papua Barat	95.643.145	Merupakan sisa UP pada satker Rupbasan Manokwari sebesar Rp95.643.145,00 telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 4 Januari 2013.
15.	Kalimantan Barat	1.475.195	Merupakan sisa UP pada satker Rutan Sambas sebesar Rp1.378.180,00 dan Rupbasan Singkawang sebesar Rp97.015,00. Seluruhnya telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 4 Januari 2013.
16.	Nusa Tenggara Barat	973	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Rutan BIMA yang telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 2 Januari 2013, NTPN 9031330106060910
17.	Bali	124.615.964	Merupakan sisa Uang Persediaan TA 2012 pada Kanwil Bali yang telah disetorkan pada Kas Negara tanggal 4 Januari 2013 NTPN 1304041108091310 sebesar Rp78.385.485,00 dan pada tanggal 8 Januari 2013 NTPN 503090311000504 sebesar Rp46.230.479,00.
18.	Kalimantan Tengah	35.000.000	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Rutan Kuala Kapuas yang telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 2013, NTPN 02040908050601
19.	Kalimantan Timur	85.000	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Rutan Samarinda yang telah disetorkan ke Kas Negara 2013
20.	Maluku	50.000.000	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Rutan Masohi dan telah disetorkan ke Kas Negara tanggal TA 2013
21.	Sulawesi Tenggara	96.113.400	Merupakan sisa uang tunai TA 2012 dengan rincian sebagai berikut: - Bapas Kendari : Rp2.436.840,00, disetor ke Kas Negara tanggal 4 Januari 2013 NTPN 1100140902141410; - Kanwil Sultra : Rp82.643.040,00, disetor ke Kas Negara tanggal 4 Januari 2013 NTPN 1306141202120708; - Rutan Kendari : Rp20,00, disetor ke Kas Negara tanggal 7 Januari 2013 NTPN 1111020613000204; - Bapas Bau-Bau : Rp11.033.500,00, disetor ke Kas Negara tanggal 7 Januari 2013 NTPN 0705031412141505.

22.	Sumatera Selatan	34.641.848	Merupakan sisa Uang Persediaan TA 2012 dengan rincian sebagai berikut : - Lapas Wanita Palembang sebesar Rp16.623.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara tanggal 11 Januari 2013 dengan NTPN 0203020913060112 - Lapas Lubuk Linggau sebesar Rp15.641.097,00 telah disetor ke Kas Negara tanggal 4 Januari 2013 Merupakan sisa UP dan TUP TA 2012 pada Kanim Muara Enim dengan rincian sebagai berikut : - UP PNBPN sebesar Rp1.831.000,00. Sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2013 - UP RM sebesar Rp150.000,00. Sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2013 - UP TUP sebesar Rp.396.434,00. Sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2013 NTPN 0313131002101401 Merupakan GU Nihil pada Cabrutan Muaradua sebesar Rp317,00 yang telah disetorkan ke Kas Negara TA 2013
23.	Sumatera Utara	385	Merupakan sisa Uang Persediaan TA 2012 pada Lapas Padang Sidimpuan dan telah disetor ke Kas Negara tanggal 5 Januari 2013 NTPN 1406081511061010
25.	Atase Imigrasi	905.092.615	Rincian sesuai dengan tabel 33
Jumlah		4.905.638.455	

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri dan Status Penyetorannya ke Kas Negara disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 33. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri dan Status Penyetorannya ke Kas Negara

No	Perwakilan	Nominal (Rp)	Keterangan	NTPN
1	Singapura	-		
2	Kuala Lumpur	861.014	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 15 Januari 2013	1114070714021400
3	Penang	-		
4	Bangkok	5.469.705	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 9 Januari 2013	0813041412150200
5	Hongkong	485.820	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 28 Januari 2013	0109081400021414
6	Tokyo	70.195.113	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 19 April 2013	0305150305080100
7	Davao	16.707.623	Sisa UP dan telah disetor ke	1312100808091310

			kas negara tanggal 9 Januari 2013	
8	Den Haag	329.728.511	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 3 Januari 2013	1313061000061012
9	Berlin	164.239.464	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 15 Januari 2013	0811121004020506
10	Sydneys	-		
11	Kuching	130.690	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 14 Februari 2013	1500081406090209
12	Tawao	95.695.999	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 9 Januari 2013	0607021110100709
13	Los Angeles	37.179.236	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 25 Februari 2013 dengan potongan SPM UP 2013	
14	Jeddah	152.009.898	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 3 Januari 2013	0915090114000405
15	Beijing	16.140.965	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 4 April 2013	1401080707071402
16	Johor Bahru	871.988	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 21 Februari 2013	0313101202021505
17	Dilli	382.573	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 28 Januari 2013	0810010701140812
18	Guangzhou	14.994.016	Sisa UP dan telah disetor ke kas negara tanggal 9 April 2013	0501140313011004
		905.092.615		

Kas di Bendahara Penerimaan

C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas fungsional Kemenkumham terkait PNBP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Kemenkumham per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp5.804.728.975,00 dan per 31 Desember 2011 sebesar Rp6.629.895.698,00. Jika dilihat dari saldo 2011 sebesar Rp6.629.895.698,00, maka saldo per 31 Desember 2012 terjadi penurunan sebesar Rp825.166.723,00 atau 12,45 persen. Berikut rincian unit eselon I di lingkungan Kemenkumham yang masih memiliki saldo Kas di Bendahara Penerimaan periode 31 Desember 2012 dan status penyetorannya ke Kas Negara.

Tabel 34. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dan Status Penyetorannya ke Kas Negara

No	Kanwil/Eselon I	Saldo	Keterangan
1.	Ditjen AHU	1.221.350.000	Merupakan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2012. Saldo tersebut seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 2 Januari 2013 NTPN 0600011111040909
2.	Ditjen Imigrasi	3.910.003.475	Merupakan penerimaan PNBPN keimigrasian bulan Desember 2012 yang belum disetor ke Kas Negara. Pada tanggal 2 Januari 2013 saldo tersebut seluruhnya telah disetor ke Kas Negara NTPN 0510040409060100
3.	Ditjen HKI	200.425.500	PNBP yang belum diketahui pemiliknya sehingga sampai laporan keuangan ini disusun dan dilaporkan, saldo tersebut belum disetorkan ke Kas Negara.
4.	Jawa Barat	164.995.000	Merupakan PNBPN keimigrasian satuan kerja Kantor Imigrasi Bandung sebesar Rp164.395.000,00, telah disetorkan ke kas negara tanggal 2 Januari 2013 NTPN 1515060210090602 dan penerimaan hasil karya narapidana pada Lapas Bancey sebesar Rp600.000,00, telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2013. .
5.	Jawa Tengah	23.530.000	Merupakan PNBPN keimigrasian satuan kerja Kantor Imigrasi Pemalang pada akhir Desember 2012 yang telah disetorkan pada 02 Januari 2013 dengan nomor NTPN : 0312100504130315
6.	Papua	1.020.000	Merupakan kas di Bendahara Pengeluaran pada satker Kanim Biak yang sampai dengan 31 Desember 2012 belum disetor ke Kas Negara. Pada tanggal 3 Januari 2013 seluruh saldo telah disetorkan ke Kas Negara masing-masing sebesar Rp510.000,00 NTPN 1413140602011006 dan Rp510.000,00 NTPN 0701031203050400.
7.	Kalimantan Timur	10.050.000	Penerimaan PNBPN Kanim Tarakan bulan Desember 2012 yang belum disetor ke Kas Negara. Saldo tersebut tanggal 2 Januari 2013 seluruhnya telah disetor ke Kas Negara
8.	Bali	273.100.000	Telah disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2013
9.	Maluku Utara	255.000	Penerimaan PNBPN Kanim Ternate yang belum disetor ke Kas Negara. Saldo tersebut tanggal 2 Januari 2013 seluruhnya telah disetor ke Kas Negara
Jumlah		5.804.728.975	

Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari sisa UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai per tanggal neraca.

Akun Kas Lainnya dan Setara Kas di Kemenkumham memiliki beberapa kontra akun yaitu Pendapatan yang Ditangguhkan, Utang Kepada Pihak Ketiga dan Ekuitas Dana Lancar Lainnya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor S.4080/PB/2009 tanggal 28 Juli 2009.

Akun Kas Lainnya dan Setara Kas pada Pendapatan yang Ditangguhkan digunakan untuk mencatat sisa Belanja Bahan Makanan (Bama), Jasa Giro dan sisa Belanja Pegawai yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2012. Akun Kas Lainnya dan Setara Kas pada Utang Kepada Pihak Ketiga digunakan untuk mencatat sisa Pengembalian Tunjangan Kinerja Tahun 2012 yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan Setjen dan di Bendahara Pengeluaran Satker per 31 Desember 2012. Sedangkan akun Kas Lainnya dan Setara Kas pada Ekuitas Dana Lancar Lainnya digunakan untuk mencatat sisa hibah yang belum dibelanjakan per 31 Desember 2012.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Kemenkumham per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp20.417.269.305,00 dan per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.155.885.364,00. Jika dilihat dari saldo 2011, maka saldo per 31 Desember 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp18.261.383.941,00 atau 847,05 persen.

Tabel 35. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Kode	Kas Lainnya dan Setara Kas (Rp)	Pendapatan ditangguhkan (Rp)	Utang Pihak ke 3 (Rp)	Ekuitas Dana Lancar Lainnya (Rp)
1	Unit Pusat	6.418.497.271	5.795.752.432	472.972.512	149.772.327
2	DKI Jakarta	31.270.000	-	31.270.000	-
3	Jawa Barat	18.460.333	18.429.733	30.600	-
4	Jawa Tengah	2.273.410	9.858	2.263.552	-
5	DI. Yogyakarta	25.543.600	17.476.100	8.067.500	-
6	Jawa Timur	173.537.863	153.476.819	20.061.044	-
7	Aceh	18.989.625	-	18.989.625	-
8	Sumatera Utara	15.488.029	-	15.488.029	-
9	Sumatera Selatan	33.484.709	-	33.484.709	-
10	Lampung	3.757.838	-	3.757.838	-
11	Kalimantan Barat	7.111.250	-	7.111.250	-
12	Kalimantan	13.488.434.400	-	-	13.488.434.400

	Timur				
13	Sulawesi Utara	143.219	-	143.219	-
14	Sulawesi Tengah	3.765.618	-	3.765.618	-
15	Maluku	24.776.174	-	24.776.174	-
16	Bali	109.399.395	-	109.399.395	-
17	NTB	10.293.950	-	10.293.950	-
18	NTT	1.071.434	173.084	898.350	-
19	Papua	6.805.491	-	6.805.491	-
20	Bengkulu	4.600	-	4.600	
21	Maluku Utara	5.450.700	-	5.450.700	
22	Babel	26.021	26.021	-	-
23	Gorontalo	2	-	2	-
24	Kepri	1.353.473	-	1.353.473	-
25	Papua Barat	17.330.900	-	17.330.900	-
JUMLAH		20.417.269.305	5.985.344.047	793.718.531	13.638.206.727

**Piutang
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak**

C.2.1.4. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan hak yang akan diterima dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kemenkumham per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp37.497.955.959,00 dan per 31 Desember 2011 sebesar Rp18.343.360.446,00. Jika dilihat dari saldo tahun 2011, maka per 31 Desember 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp19.154.595.513,00 atau 104,42 persen.

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kemenkumham per 31 Desember 2012 sebagian besar merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2012. Berikut adalah rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.

Tabel 36. Rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian Eselon I/Kanwil	Saldo (Rp)	Keterangan
Setjen	4.251.662.812	Temuan BPK 2011 atas Gunung Sindur
	831.600.000	Kelebihan bayar atas kontrak pengadaan aset meubel 2012
Ditjen HKI	31.669.518.500	Biaya pemeliharaan paten, paten batal demi hukum, pembatalan paten atas permintaan sendiri dan piutang denda kontrak
Kanwil Jawa Tengah	20.000.000	Piutang PNBSP Sewa Gedung oleh BNI
Kanwil Sulawesi Tenggara	14.531.671	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan rehabilitasi gedung Aula)
Rupbasan Kendari	15.777.713	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan pembuatan pagar kantor)
Bapas Kendari	34.433.477	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan infrastruktur halaman kantor)
Rutan Kendari	25.794.100	Temuan BPK 2012 (Belanja persediaan dana UP)

	40.500.681	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan extravoeding))
	20.583.217	Temuan BPK 2012 (Penataan halaman dan area parkir)
Lapas Kendari	56.018.857	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan perluasan gedung kantor)
	18.894.749	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan perluasan gedung kantor)
	21.543.060	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan perluasan gedung kantor)
	14.969.376	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan rehabilitasi dinding blok, pagar, pos jaga dan tembok poliklinik)
Rutan Raha	125.629.536	Temuan BPK 2012 (Koefisien analisa harga satuan pembangunan blok tahanan dan pagar)
	17.184.610	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan pembangunan mushola, gereja, pos jaga dan pos monyet)
	17.329.516	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan blok tahanan dan pos jaga)
	7.800.000	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan tembok keliling)
	25.939.880	Temuan BPK 2012 (Pekerjaan urugan/pematangan lokasi, blok tahanan dan pagar)
Kanim Ambon	16.329.000	Temuan BPK
Kanwil Maluku	33.838.775	Temuan BPK
Lapas Piru	34.136.884	Temuan BPK
Carut Saumlaki	76.873.772	Temuan BPK
Carut Namlea	107.065.773	Temuan BPK
Jumlah	37.497.955.959	-

Atas nilai Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut tidak menunjukkan potensi PNBP yang dikelola oleh Kemenkumham. Hal ini karena Kemenkumham belum melaksanakan inventarisasi dan penagihan atas PNBP terutang biaya pemeliharaan tahunan paten pada Ditjen HKI dan PNBP terutang persetujuan pemakaian nama pada Ditjen AHU. Inventarisasi terkendala tidak sesuai informasi yang tercantum pada aplikasi paten dengan dokumen fisik dan tidak adanya modul pembayaran pada aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Nilai potensi PNBP Biaya pemeliharaan tahunan paten yang belum ditagihkan apabila didasarkan dengan informasi yang disediakan oleh aplikasi paten diperkirakan sekitar Rp154.662.595.750,00 yang berasal dari tunggakan biaya pemeliharaan tahunan atas paten yang dapat diberikan status BDH sebanyak 7.842 ID paten dan tunggakan biaya pemeliharaan tahunan selama kurang dari 3 tahun berturut-turut sebanyak 1.005 ID paten.

Nilai potensi PNBP persetujuan pemakaian nama perseroan yang belum ditagihkan apabila didasarkan dengan informasi yang disediakan oleh aplikasi SABH masih dalam proses verifikasi. Nilai potensi PNBP tersebut diperkirakan mencapai nilai Rp16.775.000.000,00 yang didalamnya termasuk tunggakan atas pokok biaya sampai dengan 31 Desember 2012 atas 83.875 persetujuan nama.

Ditjen HKI dan Ditjen AHU berencana akan melakukan inventarisasi dan penagihan atas tunggakan PNPB terutang tersebut dengan melaksanakan validasi atas informasi yang disajikan pada aplikasi.

Berikut adalah hasil validasi sementara yang telah dilaksanakan:

1. Ditjen HKI telah melaksanakan validasi keabsahan data sampai dengan per 30 April 2013 sebanyak 2.802 ID Paten dengan nilai tunggakan sebesar Rp31.793.180.000,00; dan
2. Ditjen AHU telah melaksanakan verifikasi kepada 83.875 persetujuan nama dan telah dilaksanakan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp2.379.200.000,00. Atas penyetoran tersebut Ditjen AHU belum memperhitungkan pengenaan denda keterlambatan.

Selain itu, dari hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kemenkumham TA 2012 *unaudited*, sampai tanggal 28 Mei 2013 terdapat potensi piutang atas indikasi kerugian negara dari pelaksanaan belanja sebesar Rp12.356.271.302,17, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37. Rincian Potensi Piutang

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Kegiatan/Paket Pengadaan	Nilai Temuan
Setjen			
1	PT Telekomunikasi Indonesia	Pengadaan Sewa Jaringan Virtual Private Number (VPN) pada Setjen	173.731.536,00
Jumlah (Setjen)			173.731.536,00
Ditjen Imigrasi			
1	PT Gagasan Adinusa	Pengadaan Perangkat Pendukung Operasionalisasi Pelayanan Kanim dan Rudenim pada Ditjen Imigrasi	1.489.652.748,00
2	PT Sanur Marindo Shipyard	Pengadaan Speed Boat Patroli Imigrasi TA 2012 pada Ditjen Imigrasi	1.112.253.219,00
3	PT Multidata Rancana Prima	Pengadaan Perangkat Indeks Kepuasan Masyarakat pada Ditjen Imigrasi	1.052.867.613,00
4	PT Indotech Ina Engineering	Pengadaan Pembangunan Fasilitas Sistem Monitoring Kinerja Aplikasi pada Ditjen Imigrasi	1.030.705.511,00
5	PT Indo Mukti Nusantara	Pengadaan Peralatan Komunikasi Keimigrasian Ditjen Imigrasi	822.661.500,00
6	PT Indo Mukti Nusantara	Pengadaan Genset TA 2012 pada Ditjen Imigrasi	559.259.900,00
7	PT Andhika Graha Teknindo	Pengadaan Sarana Laboratorium Peningkatan Kualitas SDM Imigrasi	307.917.032,00
8	PT Central Auto Comperindo	Pengadaan Kendaraan Tahanan Imigrasi TA 2012	179.590.090,00

		pada Ditjen Imigrasi	
9	PT Andhika Graha Teknindo	Pengadaan Sarana Laboratorium Peningkatan Kualitas SDM Imigrasi	10.213.107,00
Jumlah (Ditjen Imigrasi)			6.565.120.720,00
Ditjen HKI			
1	CV Nasabe Wisnu Rajasa	Pengadaan Pencetakan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual TA 2012 pada Ditjen HKI	33.246.400,00
Jumlah (Ditjen HKI)			33.246.400,00
Ditjen AHU			
1	PT Kotindo Panca Manunggal	Pengadaan Fire Fighting pada Ditjen AHU	3.336.600.654,00
2	PT Mitra Integrasi Informatika	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur dan Jaringan Komputer pada Ditjen AHU	395.300.778,17
Jumlah (Ditjen AHU)			3.731.901.432,17
Ditjen Pemasyarakatan			
1	PT Mapan Lestari Sejahtera	Pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (APBN) pada Ditjen Pemasyarakatan	1.038.151.534,00
2	PT Mapan Lestari Sejahtera	Pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (APBN-P) pada Ditjen Pemasyarakatan	814.119.680,00
Jumlah (Ditjen Pemasyarakatan)			1.852.271.214,00
TOTAL (KEMENKUMHAM)			12.356.271.302,17

**Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Piutang
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak**

C.2.1.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang sehingga dapat diketahui Nilai Piutang Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV). Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan formula penghitungan sesuai Surat Edaran Sekjen Nomor SEK.KU.03.03-156 tentang Kualitas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tanggal 7 November 2012. Kemenkumham baru melakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih mulai Tahun 2012. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kemenkumham per 31 Desember 2012 adalah sebesar minus Rp12.670.630.903.00 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah NIHIL. Berikut adalah rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja di lingkungan Kemenkumham:

**Tabel 38. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2012**

Piutang Pemerintah Negara Bukan Pajak 31 Desember 2012						
No	Uraian	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Keterangan
1	Ditjen HKI	Kurang Lancar	186.600.000	10%	18.660.000	Paten
		Diragukan	482.815.000	50%	241.407.500	Paten
		Macet	12.287.860.000	100%	12.287.860.000	Paten
		Lancar	15.781.561.750	0,50%	78.907.808	Paten
		Lancar	2.930.681.750	0,50%	14.653.408	Paten
		Jumlah	31.669.518.500		12.641.488.716	
2	Setjen	Lancar	4.251.662.812	0,50%	21.258.314	Temuan BPK atas LKKL 2011
		Lancar	831.600.000	0,50%	4.158.000	Kelebihan bayar atas CV Lapindo
Jumlah			5.083.262.812		25.416.314	
3	Maluku :					
	- Kanwil Maluku	Lancar	33.838.775	0,50%	169.194	Temuan BPK atas LKKL 2011
	- Lapas Piru	Lancar	34.136.884	0,50%	170.684	sda
	- Carut Saumlaki	Lancar	76.873.772	0,50%	384.369	sda
	- Carut Namlea	Lancar	107.065.773	0,50%	535.329	sda
	- Kanim Ambon	Lancar	16.329.000	0,50%	81.645	sda
	Jumlah	268.244.204		1.341.221		
4	Jawa Tengah	Lancar	20.000.000	0,50%	100.000	Piutang Sewa
Jumlah			20.000.000		100.000	
5	Sulawesi Tenggara	Lancar	111.426.041	0,50%	557.130	Temuan BPK atas LKKL 2011
	- Lp Kendari					
	- Bapas Kendari	Lancar	34.433.477	0,50%	172.167	sda
	- Rutan Raha	Lancar	193.883.543	0,50%	969.418	sda
	- Rutan Kendari	Lancar	86.877.998	0,50%	434.390	sda
	- Rupbasan Kendari	Lancar	15.777.713	0,50%	78.889	sda
	- Kanwil Kendari	Lancar	14.531.671	0,50%	72.658	sda
	Jumlah	456.930.443		2.284.652		
Total			37.497.955.959		12.670.630.903	

**Piutang
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak (Netto)**

C.2.1.6. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (*Netto*)

Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (*Netto*) Kemenkumham per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp24.827.325.056.00 dan per 31 Desember 2011 sebesar Rp18.343.360.446.00. Jika dilihat dari saldo 2011, maka per 31 Desember 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp6.483.964.610.00 atau 35,35 persen. Berikut adalah rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Netto pada satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.

Tabel 39. Rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Netto per 31 Desember 2012

No	Uraian	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan	Piutang Bukan Pajak - Netto	Keterangan
1	Ditjen HKI	186.600.000	18.660.000	167.940.000	Paten
		482.815.000	241.407.500	241.407.500	Paten
		12.287.860.000	12.287.860.000	-	Paten
		15.781.561.750	78.907.808	15.702.653.942	Paten
		2.930.681.750	14.653.408	2.916.028.342	Paten
	Jumlah	31.669.518.500	12.641.488.716	19.028.029.784	
2	Setjen	4.251.662.812	21.258.314	4.230.404.498	Temuan BPK atas LKKL 2011
		831.600.000	4.158.000	827.442.000	Kelebihan bayar atas CV Lapindo
	Jumlah	5.083.262.812	25.416.314	5.057.846.498	
3	Maluku :				
	- Kanwil Maluku	33.838.775	169.194	33.669.581	Temuan BPK atas LKKL 2011
	- Lapas Piru	34.136.884	170.684	33.966.200	sda
	- Carut Saumlaki	76.873.772	384.369	76.489.403	sda
	- Carut Namlea	107.065.773	535.329	106.530.444	sda
	- Kanim Ambon	16.329.000	81.645	16.247.355	sda
	Jumlah	268.244.204	1.341.221	266.902.983	
4	Jawa Tengah	20.000.000	100.000	19.900.000	Piutang Sewa
	Jumlah	20.000.000	100.000	19.900.000	
5	Sulawesi Tenggara	111.426.041	557.130	110.868.911	Temuan BPK atas LKKL 2011
	- Lp Kendari				sda
	- Bapas Kendari	34.433.477	172.167	34.261.310	sda
	- Rutan Raha	193.883.543	969.418	192.914.125	sda
	- Rutan Kendari	86.877.998	434.390	86.443.608	sda
	- Rupbasan Kendari	15.777.713	78.889	15.698.824	sda
	- Kanwil Kendari	14.531.671	72.658	14.459.013	sda
	Jumlah	456.930.443	2.284.652	454.645.791	
	Total	37.497.955.959	12.670.630.903	24.827.325.056	

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian (TP/TGR)

C.2.1.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan per tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Klaim tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang dibuat pihak yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kemenkumham per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp178.837.498,00 dan per 31 Desember 2011 sebesar Rp168.980.500,00. Jika dilihat dari saldo tahun 2011, maka per 31 Desember 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp9.856.998,00 atau 5,83 persen. Berikut adalah rincian Bagian Lancar TP/TGR pada satuan kerja di lingkungan Kemenkumham:

Tabel 40. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

No	Kanwil/ Eselon I	Bagian Lancar TP/TGR	Keterangan
1.	Sekretariat Jenderal	Rp8.400.000	TP/TGR atas nama H. A.Budiman sebesar Rp8.100.000,00 dan Nuras sebesar Rp71.012.423,82
2.	Ditjen AHU	Rp2.838.000	TP/TGR atas nama Dedy A. Kusnadi sebesar Rp1.200.000,00 dan Rizah sebesar Rp1.638.000,00.
3.	Ditjen Imigrasi	Rp32.449.998	TP/TGR atas nama Budi Supriadi sebesar Rp27.199.998,00 dan Amirullah sebesar Rp5.250.000,00.
4.	Ditjen PP	Rp728.500	TP/TGR atas nama Julkhaidir, SH., MH
5.	DKI	Rp12.513.000	Merupakan TGR atas nama Zulfikar dari Kanim Klas I Jakarta Utara dari tahun 2010 s/d 2014 dengan cicilan per bulannya Rp. 1.042.750,00
6.	Jawa Barat	Rp4.608.000	TGR An. Sumi Rahayu pada satker Kanwil Jawa Barat sebesar Rp1.200.000,00 dan Triana Aryati Bc.Ip pada satker LP Wanita Bandung sebesar Rp3.408.000,00.
7.	Jambi	Rp56.400.000	
8.	Sulawesi Tenggara	Rp6.000.000	TP/TGR atas nama Natalis Sp., SH pada satker Kanwil Sulawesi Tenggara
9.	Nusa Tenggara Timr	Rp30.900.000	a. An. I Gusti Kadek Susila pada Kanim Kupang sebesar Rp178.530.000,00; b. An.Servas Pancrasius Suni pada Kanim Atambua sebesar Rp115.770.000,00; c. An. Walpen Spayung, SH pada Kanim Atambua sebesar Rp10.700.000,00; d. An. Ferizal, S.Sos pada Kanim Maumere sebesar Rp13.300.000,00
12.	Maluku Utara	Rp24.000.000	
	jumlah	Rp178.837.498	

Penyisihan**Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR**

C.2.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan formula penghitungan sesuai Surat Edaran Sekjen No.SEK.KU.03.03-156 tentang Kualitas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tanggal 7 November 2012. Kementerian Hukum dan HAM baru melakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih mulai Tahun 2012.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kemenkumham per 31 Desember 2012 sebesar minus Rp894.188,00. Sedangkan per 31 Desember 2011 adalah NIHIL. Berikut adalah rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada satuan kerja di lingkungan Kemenkumham:

Tabel 41. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

No	Uraian	Kualitas	Bagian Lancar TP/TGR (Rp)	Penyisihan TP/TGR (Rp)	Keterangan
1	Setjen	Lancar	8.400.000	(42.000)	TP/TGR atas nama H. A.Budiman sebesar Rp8.100.000,00 dan Nuras sebesar Rp71.012.423,82
2	Ditjen AHU	Lancar	2.838.000	(14.190)	TP/TGR atas nama Dedy A. Kusnadi sebesar Rp1.200.000,00 dan Rizah sebesar Rp1.638.000,00.
3	Ditjen Imigrasi	Lancar	32.449.998	(162.250)	TP/TGR atas nama Budi Supriadi sebesar Rp27.199.998,00 dan Amirullah sebesar Rp5.250.000,00.
4	Ditjen PP	Lancar	728.500	(3.643)	TP/TGR atas nama Julkhaidir, SH., MH
5	DKI Jakarta	Lancar	12.513.000	(62.565)	Merupakan TGR atas nama Zulfikar dari Kanim Klas I Jakarta Utara dari tahun 2010 s/d 2014 dengan cicilan per bulannya Rp. 1.042.750,00
6	Jawa Barat	Lancar	4.608.000	(23.040)	TGR An. Sumi Rahayu pada satker Kanwil Jawa Barat sebesar Rp1.200.000,00 dan Triana Aryati Bc.Ip pada satker LP Wanita Bandung sebesar Rp3.408.000,00.
7	Jambi	Lancar	56.400.000	(282.000)	
8	Sulawesi Tenggara	Lancar	6.000.000	(30.000)	TP/TGR atas nama Natalis Sp., SH pada satker Kanwil Sulawesi Tenggara
9	NTT	Lancar	30.900.000	(154.500)	1. An. I Gusti Kadek Susila pada Kanim Kupang sebesar Rp178.530.000,00;
					2. An.Servas Pancrasius Suni pada Kanim Atambua sebesar Rp115.770.000,00;
					3. An. Walpen Spayung, SH pada Kanim Atambua sebesar Rp10.700.000,00;
					4. An. Ferizal, S.Sos pada Kanim Maumere sebesar Rp13.300.000,00
10	Maluku Utara	Lancar	24.000.000	(120.000)	
Total			178.837.498	(894.188)	

Bagian Lancar TP/TGR (Netto) C.2.1.9. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian (Netto)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian (Netto) Kemenkumham per 31 Desember 2012 sebesar Rp177.943.310,00 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp168.980.500,00. Berikut adalah rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Netto pada satuan kerja di lingkungan Kemenkumham:

Tabel 42. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

No	Uraian	Bagian Lancar TP/TGR	Penyisihan TP/TGR	Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	Keterangan
1	Setjen	8.400.000	(42.000)	8.358.000	TP/TGR atas nama H. A. Budiman sebesar Rp8.100.000,00 dan Nuras sebesar Rp71.012.423,82
2	Ditjen AHU	2.838.000	(14.190)	2.823.810	TP/TGR atas nama Dedy A. Kusnadi sebesar Rp1.200.000,00 dan Rizah sebesar Rp1.638.000,00.
3	Ditjen Imigrasi	32.449.998	(162.250)	32.287.748	TP/TGR atas nama Budi Supriadi sebesar Rp27.199.998,00 dan Amirullah sebesar Rp5.250.000,00.
4	Ditjen PP	728.500	(3.643)	724.857	TP/TGR atas nama Julkhaidir, SH., MH
5	DKI Jakarta	12.513.000	(62.565)	12.450.435	Merupakan TGR atas nama Zulfikar dari Kanim Klas I Jakarta Utara dari tahun 2010 s/d 2014 dengan cicilan per bulannya Rp. 1.042.750,00
6	Jawa Barat	4.608.000	(23.040)	4.584.960	TGR An. Sumi Rahayu pada satker Kanwil Jawa Barat sebesar Rp1.200.000,00 dan Triana Aryati Bc.Ip pada satker LP Wanita Bandung sebesar Rp3.408.000,00.
7	Jambi	56.400.000	(282.000)	56.118.000	
8	Sulawesi Tenggara	6.000.000	(30.000)	5.970.000	TP/TGR atas nama Natalis Sp., SH pada satker Kanwil Sulawesi Tenggara
9	NTT	30.900.000	(154.500)	30.745.500	1. An. I Gusti Kadek Susila pada Kanim Kupang sebesar Rp178.530.000,00; 2. An. Servas Pancrasius Suni pada Kanim Atambua sebesar Rp115.770.000,00; 3. An. Walpen Spayung, SH pada Kanim Atambua sebesar Rp10.700.000,00; 4. An. Ferizal, S.Sos pada Kanim Maumere sebesar Rp13.300.000,00
10	Maluku Utara	24.000.000	(120.000)	23.880.000	
Total		178.837.498	(894.188)	177.943.310	

Uang Muka Belanja C.2.1.10 Uang Muka Belanja

Saldo Uang Muka Belanja Kemenkumham per 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00 (nihil). Sedangkan uang muka belanja per 31 Desember 2011 adalah Rp1.005.479.251,00.

C.2.1.11 Persediaan

Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp324.101.005.634,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp274.318.672.069,00 terjadi kenaikan sebesar Rp49.782.333.565,00 atau naik 18,14% dari tahun 2011. Berikut adalah rincian saldo dan mutasi Persediaan per eselon I dan per jenis persediaan selama Tahun 2012:

Tabel 43. Perbandingan Nilai Persediaan Per 31 Desember TA 2012 dan 2011

Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2012	31 Desember 2011	Kenaikan / (Penurunan)
01	SETJEN	126.494.531.831	96.355.271.404	30.139.260.427
02	ITJEN	25.476.300	8.123.200	17.353.100
03	DITJEN AHU	3.065.259.888	1.663.467.342	1.401.792.546
05	DITJEN PAS	1.236.434.128	1.513.479.473	(277.045.345)
06	DITJEN IM	188.751.301.245	170.379.643.653	18.371.657.592
07	DITJEN HKI	2.833.092.669	3.358.234.866	(525.142.197)
08	DITJEN PP	1.088.542.567	422.339.325	666.203.242
09	DITJEN HAM	435.881.716	416.872.098	19.009.618
10	BPHN	40.340.900	91.647.750	(51.306.850)
11	BALITBANG HAM	38.349.707	38.349.707	-
12	BPSDM	91.794.683	71.243.251	20.551.432
	JUMLAH	324.101.005.634	274.318.672.069	49.782.333.565

Rincian per jenis persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 44. Rincian per Jenis Persediaan Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

AKUN NERACA				
KODE	URAIAN	Jumlah Tahun 2012 (Rp)	Jumlah Tahun 2011 (Rp)	Fluktuasi (Rp)
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	68.377.218.345	38.117.119.230	30.260.099.115
117112	Amunisi	3.795.272.846	2.331.302.667	1.463.970.179
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5.720.023.277	7.626.456.541	(1.906.433.264)
117114	Suku Cadang	838.694.442	1.083.885.203	(245.190.761)
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	1.933.041.015	16.366.943	1.916.674.072
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	4.500.000	-	4.500.000
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	89.897.306	66.220.004	23.677.302
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	16.344.450	15.511.250	833.200
117126	Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	763.930.595	900.000	763.030.595
117127	Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	1.700.000	833.100	866.900
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	228.584.788.737	186.288.997.086	42.295.791.651

117131	Bahan Baku	5.347.070.260	7.312.153.039	(1.965.082.779)
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	1.051.849.213	22.712.175.512	(21.660.326.299)
117199	Persediaan lainnya	7.576.675.148	8.746.751.494	(1.170.076.346)
Jumlah		324.101.005.634	274.318.672.069	49.782.333.565

Aset Tetap**C.2.2 ASET TETAP**

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan operasional Satker Kemenkumham dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun aset Kemenkumham yang digunakan masyarakat umum seperti gedung pertemuan.

Nilai Aset Tetap Kemenkumham per 31 Desember 2012 sebesar Rp20.619.401.370.243,00 sedangkan tahun 2011 sebesar Rp18.286.914.269.929,00, terjadi kenaikan nilai aset tetap sebesar Rp2.332.487.100.314,00 atau 12,75% dari tahun 2011 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 45. Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember TA 2012 dan 2011

No.	Uraian	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2011	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	11,715,655,610,505	9,987,890,512,711	1,727,765,097,794
2	Peralatan dan Mesin	2,540,006,548,203	2,132,594,242,102	407,412,306,101
3	Gedung dan Bangunan	5,570,641,029,594	5,215,456,871,085	355,184,158,509
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	161,477,026,260	136,860,127,534	24,616,898,726
5	Aset Tetap Lainnya	44,614,453,012	24,002,893,923	20,611,559,089
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	587,006,702,669	790,109,622,574	(203,102,919,905)
	Jumlah	20,619,401,370,243	18,286,914,269,929	2,332,487,100,314

Tanah**C.2.2.1 Tanah**

Tanah yang dikuasai Kemenkumham baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat digunakan untuk kegiatan operasional Satker Kemenkumham. Saldo Tanah Kemenkumham per 31 Desember 2012 sebesar Rp11.715.655.610.505,00 jika dibandingkan dengan saldo tanah per 31 Desember 2011 sebesar Rp9.987.890.512.711,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.727.765.097.794,00 atau 17,30% dari tahun 2011.

Perbandingan nilai Tanah per 31 Desember 2012 dengan periode sebelumnya per eselon I sebagai berikut:

Tabel 46. Perbandingan Aset Tanah Per 31 Desember TA 2012 dan 2011

Eselon I	Per 31 Des 2012	Per 31 Des 2011	Kenaikan / (penurunan)
Sekretariat Jenderal	Rp 10,753,579,894,053	Rp 9,026,609,796,259	Rp 1,726,970,097,794
Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
Ditjen AHU	Rp 20,223,700,000	Rp 20,223,700,000	Rp -
Ditjen Pemasyarakatan	Rp 37,932,095,345	Rp 37,137,095,345	Rp 795,000,000
Ditjen Imigrasi	Rp 669,662,936,750	Rp 669,662,936,750	Rp -
Ditjen HKI	Rp -	Rp -	Rp -
Ditjen PP	Rp -	Rp -	Rp -
Ditjen HAM	Rp -	Rp -	Rp -
BPHN	Rp 62,980,084,357	Rp 62,980,084,357	Rp -
Balitbang HAM	Rp -	Rp -	Rp -
BPSDM	Rp 171,276,900,000	Rp 171,276,900,000	Rp -
Jumlah	Rp 11,715,655,610,505	Rp 9,987,890,512,711	Rp 1,727,765,097,794

Rincian mutasi tambah atau perubahan nilai Tanah sebesar Rp1.727.765.097.794,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 47. Rincian mutasi Aset Tetap - Tanah Tahun 2012

Keterangan	Jumlah (Rp)
A. Penambahan	
Penambahan Saldo Awal	218.638.429.119
Pembelian	19.550.250.000
Transfer masuk	6.542.145.750
Hibah (Masuk)	1.572.924.000
Reklasifikasi Masuk	3.757.090.186.528
Pengembangan Nilai Aset	26.463.416
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	26.464.555.465
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	105.321.862.931
Pengembangan Melalui KDP	13.666.525.019
Perolehan Lainnya	1.214.094.000
Pertukaran	500.000.000
JUMLAH	4.150.587.436.228
B. Pengurangan	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	. 85.900.399.124
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	. 28.326.862.965
Penghapusan	. 4.000.000
Transfer keluar	. 19.257.458.500
Reklasifikasi Keluar	. 2.245.799.315.090
Koreksi Pencatatan Nilai	. 43.438.927.755
Penghentian aset dari penggunaan	. 95.375.000
JUMLAH	. 2.422.822.338.434
JUMLAH (A-B)	. 1.727.765.097.794

Peralatan dan Mesin C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin merupakan peralatan yang digunakan oleh Kemenkumham dalam kegiatan sehari-hari yang disesuaikan dengan tugas pokok Kemenkumham. Peralatan mesin yang dicatat dalam saldo peralatan dan mesin adalah peralatan mesin dalam kondisi layak untuk digunakan. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.540.006.548.203,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.132.594.242.102,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp407.412.306.101,00 atau 19,10% dari tahun 2011.

Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 dengan periode sebelumnya per eselon I dan rincian mutasinya disajikan sebagai berikut :

Tabel 48. Perbandingan Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2012 dan 2011

Eselon I	Per 31 Des 2012	Per 31 Des 2011	Kenaikan / (penurunan)
Sekretariat Jenderal	Rp 1,651,634,950,353	Rp 1,312,573,290,874	Rp 339,061,659,479
Inspektorat Jenderal	Rp 8,662,550,509	Rp 7,634,356,349	Rp 1,028,194,160
Ditjen AHU	Rp 111,714,302,457	Rp 79,205,778,396	Rp 32,508,524,061
Ditjen Pemasyarakatan	Rp 37,514,218,962	Rp 68,668,936,081	Rp (31,154,717,119)
Ditjen Imigrasi	Rp 591,177,176,482	Rp 535,254,407,886	Rp 55,922,768,596
Ditjen HKI	Rp 52,187,479,989	Rp 45,160,078,900	Rp 7,027,401,089
Ditjen PP	Rp 19,259,313,581	Rp 17,767,337,205	Rp 1,491,976,376
Ditjen HAM	Rp 11,043,355,400	Rp 12,433,264,750	Rp (1,389,909,350)
BPHN	Rp 13,465,411,922	Rp 12,613,097,291	Rp 852,314,631
Balitbang HAM	Rp 8,000,324,800	Rp 6,780,720,300	Rp 1,219,604,500
BPSDM	Rp 35,347,463,748	Rp 34,502,974,070	Rp 844,489,678
Jumlah	Rp 2,540,006,548,203	Rp 2,132,594,242,102	Rp 407,412,306,101

Rincian mutasi tambah atau perubahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp407.412.306.101,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2012

Keterangan	Jumlah (Rp)
A. Penambahan	
Penambahan Saldo Awal	56.827.387.086
Pembelian	394.431.072.266
Transfer masuk	99.248.084.567
Hibah (Masuk)	1.953.772.632
Pembatalan Penghapusan	128.745.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	3.119.081.850
Penyelesaian Pembangunan Langsung	152.835.000
Reklasifikasi Masuk	7.511.525.662
Pengembangan Nilai Aset	14.180.563.917
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.969.993.739
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	4.147.780.729
Perolehan Lainnya	941.249.568
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.518.317.688
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra	719.945.784
Pengembangan Melalui KDP	102.300.000

Pertukaran	160.699.400
Rampasan	941.236.000
JUMLAH	590.054.590.888
B. Pengurangan	
Pengurangan Nilai Aset	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	6.603.144.002
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	11.530.765.847
Penghapusan	2.294.213.216
Transfer keluar	109.426.189.924
Reklasifikasi Keluar	16.383.761.564
Koreksi Pencatatan	873.164.373
Penghentian aset dari penggunaan	35.498.399.450
Penghapusan Semu karena Reklas	32.646.411
JUMLAH	182.642.284.787
JUMLAH (A-B)	407.412.306.101

Gedung dan Bangunan dan C.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kemenkumham per 31 Desember 2012 sebesar Rp5.570.641.029.594,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp5.215.456.871.085,00 terjadi kenaikan sebesar Rp355.184.158.509,00 atau naik 6,81% dari tahun 2011.

Tabel 50. Perbandingan Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2012 dan 2011

Eselon I	Per 31 Des 2012	Per 31 Des 2011	Kenaikan / (penurunan)
Sekretariat Jenderal	Rp 5.170.862.798.507	Rp 4.823.089.239.093	Rp 347.773.559.414
Inspektorat Jenderal	Rp 2.274.392.127	Rp 2.274.392.127	Rp -
Ditjen AHU	Rp 60.208.171.119	Rp 58.835.090.390	Rp 1.373.080.729
Ditjen Pemasyarakatan	Rp 42.946.889.262	Rp 41.437.783.262	Rp 1.509.106.000
Ditjen Imigrasi	Rp 97.251.738.302	Rp 94.119.819.302	Rp 3.131.919.000
Ditjen HKI	Rp 36.517.598.336	Rp 36.351.184.336	Rp 166.414.000
Ditjen PP	Rp 23.034.879.920	Rp 22.741.220.920	Rp 293.659.000
Ditjen HAM	Rp 6.412.381.854	Rp 6.105.326.488	Rp 307.055.366
BPHN	Rp 23.845.031.712	Rp 23.215.666.712	Rp 629.365.000
Balitbang HAM	Rp -	Rp -	Rp -
BPSDM	Rp 107.287.148.455	Rp 107.287.148.455	Rp -
Jumlah	Rp 5.570.641.029.594	Rp 5.215.456.871.085	Rp 355.184.158.509

Rincian mutasi tambah atau perubahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp355.184.158.509 adalah sebagai berikut:

Tabel 51. Rincian mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2012

Keterangan	Jumlah (Rp)
A. Penambahan	
Penambahan Saldo Awal	43.697.979.285
Pembelian	8.480.274.933
Transfer masuk	209.201.791.876
Hibah (Masuk)	433.619.500
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	304.741.966.773
Penyelesaian Pembangunan Langsung	383.662.100
Reklasifikasi Masuk	97.323.144.058
Pengembangan Nilai Aset	28.170.548.221
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	21.624.410.359
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	76.194.267.527

Perolehan Lainnya	2.613.078.444
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	201.147.424.202
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra	89.774.000
Pengembangan Melalui KDP	123.826.725.473
Pertukaran	3.020.229.108
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	714.354.000
JUMLAH	1.121.663.249.859
B. Pengurangan	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	255.382.277.646
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	57.820.711.457
Penghapusan	3.845.754.849
Transfer keluar	128.011.258.357
Reklasifikasi Keluar	91.822.827.214
Koreksi Pencatatan	16.149.904.427
Penghentian aset dari penggunaan	213.414.297.011
Penghapusan Semu karena Reklas	32.060.389
JUMLAH	766.479.091.350
JUMLAH (A-B)	355.184.158.509

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Kemenkumham per 31 Desember 2012 sebesar Rp161.477.026.260,00 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2011 sebesar Rp136.860.127.534,00 terjadi kenaikan sebesar Rp24.616.898.726,00 atau naik 17,99%.

Tabel 52. Perbandingan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2012 dan 2011

Eselon I	Per 31 Des 2012	Per 31 Des 2011	Kenaikan / (penurunan)
Sekretariat Jenderal	134.951.108.454	114.106.192.268	20.844.916.186
Inspektorat Jenderal	0	893.937.000	(893.937.000)
Ditjen AHU	587.150.644	587.150.644	-
Ditjen	27.500.000	-	27.500.000
Ditjen Imigrasi	22.311.232.431	17.855.812.891	4.455.419.540
Ditjen HKI	0	-	-
Ditjen PP	968.500.000	968.500.000	-
Ditjen HAM	0	-	-
BPHN	0	-	-
Balitbang HAM	0	-	-
BPSDM	2.631.534.731	2.448.534.731	183.000.000
Jumlah	161.477.026.260	136.860.127.534	24.616.898.726

Rincian mutasi tambah atau perubahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp24.616.898.726,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2012

Keterangan	Jumlah (Rp)
A. Penambahan	
Penambahan Saldo Awal	112.511.800
Pembelian	7.809.689.595
Transfer masuk	7.431.210.707
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	10.207.623.490
Penyelesaian Pembangunan Langsung	214.771.000
Reklasifikasi Masuk	2.301.632.073
Pengembangan Nilai Aset	459.142.375
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	182.133.928
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	2.699.210.312

Perolehan Lainnya	49.795.000
Pengembangan Melalui KDP	68.107.000
JUMLAH	31.535.827.280
B. Pengurangan	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	171.453.026
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	82.183.600
Transfer keluar	5.042.180.892
Reklasifikasi Keluar	1.616.760.036
Koreksi Pencatatan	1.500.000
Penghentian aset dari penggunaan	4.851.000
JUMLAH	6.918.928.554
JUMLAH (A-B)	24.616.898.726

Aset Tetap Lainnya

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Kemenkumham per 31 Desember 2012 sebesar Rp44.614.453.012,00 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2011 sebesar Rp24.002.893.923,00 terjadi kenaikan sebesar Rp20.611.559.089,00 atau naik 85,87%. Termasuk sebagai aset tetap lainnya adalah aset tetap dalam renovasi. Posisi perbandingan Saldo Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai berikut:

Tabel 54. Perbandingan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2012 dan 2011

Eselon I	Per 31 Des 2012	Per 31 Des 2011	Kenaikan / (penurunan)
Sekretariat Jenderal	Rp 33,348,189,411	Rp 17,766,062,078	Rp 15,582,127,333
Inspektorat Jenderal	Rp 26,057,824	Rp 26,057,824	Rp -
Ditjen AHU	Rp 329,197,500	Rp 148,447,500	Rp 180,750,000
Ditjen Pemasarakatan	Rp 181,389,056	Rp 179,996,896	Rp 1,392,160
Ditjen Imigrasi	Rp 4,623,527,929	Rp 44,980,890	Rp 4,578,547,039
Ditjen HKI	Rp 324,383,565	Rp 324,383,565	Rp -
Ditjen PP	Rp 135,029,732	Rp 43,250,000	Rp 91,779,732
Ditjen HAM	Rp 225,761,800	Rp 215,809,000	Rp 9,952,800
BPHN	Rp 1,176,012,964	Rp 1,028,719,464	Rp 147,293,500
Balitbang HAM	Rp 1,924,496,773	Rp 1,914,699,883	Rp 9,796,890
BPSDM	Rp 2,320,406,458	Rp 2,310,486,823	Rp 9,919,635
Jumlah	Rp 44,614,453,012	Rp 24,002,893,923	Rp 20,611,559,089

Rincian mutasi tambah atau perubahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp20.611.559.089,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 55. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2012

Keterangan	Jumlah (Rp)
A. Penambahan	
Penambahan Saldo Awal	117.695.753
Pembelian	30.195.404.227
Transfer masuk	3.647.236.331
Hibah (Masuk)	7.476.501
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	8.114.725.000
Reklasifikasi Masuk	43.150.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	6.637.292
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	45.093.900
Perolehan Lainnya	383.803.965
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	17.782.000
Pengembangan Melalui KDP	555.866.000

Pembatalan Penghapusan	1
JUMLAH	43.134.870.970
B. Pengurangan	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.151.603.150
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	30.699.772
Penghapusan	1.865.000
Transfer keluar	2.624.456.169
Reklasifikasi Keluar	18.487.594.798
Koreksi Pencatatan	68.322.100
Penghentian aset dari penggunaan	158.770.892
JUMLAH	22.523.311.881
JUMLAH (A-B)	20.611.559.089

**Konstruksi
Dalam
Pengerjaan**

C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Kemenkumham per 31 Desember 2012 sebesar Rp587.006.702.669,00 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2011 sebesar Rp790.109.622.574,00 terjadi penurunan sebesar Rp203.102.919.905,00 atau turun 25,71% dari tahun 2011.

**Piutang Jangka
Panjang**

C.2.3 PIUTANG JANGKA PANJANG

**Tagihan
TP/TGR**

C.2.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kemenkumham per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.512.747.503,00. Sedangkan periode 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp423.564.049,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.089.183.454,00 atau 257,15 persen.

Tabel 56. Rincian Tagihan TP/TGR

No	Kanwil/ Eselon I	Tagihan TP/TGR	Keterangan
1.	Sekretariat Jenderal	80.962.424	TP/TGR atas nama H. A.Budiman sebesar Rp8.100.000,00 dan Nuras sebesar Rp71.012.423,82
2.	Ditjen AHU	12.757.625	TP/TGR atas nama Dedy A. Kusnadi sebesar Rp1.200.000,00 dan Rizah sebesar Rp1.638.000,00.
3.	Ditjen Imigrasi	91.314.289	TP/TGR atas nama Budi Supriadi sebesar Rp27.199.998,00 dan Amirullah sebesar Rp5.250.000,00.
4.	Ditjen PP	-	TP/TGR atas nama Julkhaidir, SH., MH
5.	DKI	12.513.000	Merupakan TGR atas nama Zulfikar dari Kanim Klas I Jakarta Utara dari tahun 2010 s/d 2014 dengan cicilan per bulannya Rp. 1.042.750,00
6.	Jawa Barat	8.156.000	TGR An. Sumi Rahayu pada satker Kanwil Jawa Barat sebesar Rp1.200.000,00 dan Triana Aryati Bc.Ip pada satker LP Wanita Bandung sebesar Rp3.408.000,00.
7.	Jambi	44.900.000	

8.	Bengkulu	681.010.925	Merupakan reklasifikasi tagihan TP/TGR pegawai atas nama : a. Darmono Rp159.467.973,00 b. Sukidarfi Rp44.800.000,00 c. PPK LP Bnegkulu Rp34.261.760,00 d. Lukman Effendi Rp411.511.440,00 e. Karupbasan Arga Makmur Rp10.873.100,00
9.	Kalimantan Barat	11.500.000	TGR An. Marhaen Hary Prasetyo pada satker Kanim Entikong. Pegawai bersangkutan telah diberhentikan dengan tidak hormat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
10.	Sulawesi Tenggara	1.949.000	TP/TGR atas nama Natalis Sp., SH pada satker Kanwil Sulawesi Tenggara
11.	Nusa Tenggara Timur	144.475.000	a. An. I Gusti Kadek Susila pada Kanim Kupang sebesar Rp178.530.000,00; b. An.Servas Pancrasius Suni pada Kanim Atambua sebesar Rp115.770.000,00; c. An. Walpen Spayung, SH pada Kanim Atambua sebesar Rp10.700.000,00; d. An. Ferizal, S.Sos pada Kanim Maumere sebesar Rp13.300.000,00.
12.	Maluku Utara	423.209.240	
	Total	1.512.747.503	

**Penyisihan
Tagihan
TP/TGR**

C.2.3.2 Penyisihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak Tertagih Kemenkumham per 31 Desember 2012 adalah sebesar minus Rp77.474.849,00 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp0,00.

Tabel 57. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

No	Uraian	TP/TGR	Penyisihan TP/TGR	Keterangan
1	Setjen	80.962.424	(70.315.924)	TP/TGR atas nama H. A.Budiman sebesar Rp8.100.000.00 dan Nuras sebesar Rp71.012.423.82
2	Ditjen AHU	12.757.625	(63.788)	TP/TGR atas nama Dedy A. Kusnadi sebesar Rp1.200.000.00 dan Rizah sebesar Rp1.638.000.00.
3	Ditjen Imigrasi	91.314.289	(456.571)	TP/TGR atas nama Budi Supriadi sebesar Rp27.199.998.00 dan Amirullah sebesar Rp5.250.000.00.
4	DKI Jakarta	12.513.000	(62.565)	Merupakan TGR atas nama Zulfikar dari Kanim Klas I Jakarta Utara dari tahun 2010 s/d 2014 dengan cicilan per bulannya Rp1.042.750.00
5	Jawa Barat	8.156.000	(40.780)	TGR An. Sumi Rahayu pada satker Kanwil Jawa Barat sebesar Rp1.200.000.00 dan Triana Aryati Bc.Ip pada satker LP Wanita Bandung sebesar

				Rp3.408.000.00.
6	Jambi	44.900.000	(224.500)	
7	Kalimantan Barat	11.500.000	(57.500)	TGR An. Marhaen Hary Prasetyo pada satker Kanim Entikong. Pegawai bersangkutan telah diberhentikan dengan tidak hormat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
8	Sulawesi Tenggara	1.949.000	(9.745)	TP/TGR atas nama Natalis Sp.. SH pada satker Kanwil Sulawesi Tenggara
9	NTT	144.475.000	(722.375)	1. An. I Gusti Kadek Susila pada Kanim Kupang sebesar Rp178.530.000.00;
				2. An.Servas Pancrasius Suni pada Kanim Atambua sebesar Rp115.770.000.00;
				3. An. Walpen Spayung. SH pada Kanim Atambua sebesar Rp10.700.000.00;
				4. An. Ferizal. S.Sos pada Kanim Maumere sebesar Rp13.300.000.00
10	Bengkulu	681.010.925	(3.405.055)	Merupakan reklasifikasi tagihan TP/TGR pegawai atas nama :
				a. Darmono Rp159.467.973.00
				b. Sukidarfi Rp44.800.000.00
				c. PPK LP Bengkulu Rp34.261.760.00
				d. Lukman Effendi Rp411.511.440.00
11	Maluku Utara	423.209.240	(2.116.046)	-
Total		1,512,747,503	(77,474,849)	

TP/TGR (Netto) C.2.3.3 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Penyisihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.435.272.654.00 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp423.564.049.00. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.011.708.605.00 atau 238,85 persen.

Tabel 58. Rincian Tagihan TP/TGR (Netto)

No	Uraian	TP/TGR	Penyisihan TP/TGR	TP/TGR (Netto)	Keterangan
1	Setjen	80.962.424	(70.315.924)	10.646.500	TP/TGR atas nama H. A.Budiman sebesar Rp8.100.000.00 dan Nuras sebesar Rp71.012.423.82
2	Ditjen AHU	12.757.625	(63.788)	12.693.837	TP/TGR atas nama Dedy A. Kusnadi

					sebesar Rp1.200.000.00 dan Rizah sebesar Rp1.638.000.00.
3	Ditjen Imigrasi	91.314.289	(456.571)	90.857.718	TP/TGR atas nama Budi Supriadi sebesar Rp27.199.998.00 dan Amirullah sebesar Rp5.250.000.00.
4	DKI Jakarta	12.513.000	(62.565)	12.450.435	Merupakan TGR atas nama Zulfikar dari Kanim Klas I Jakarta Utara dari tahun 2010 s/d 2014 dengan cicilan per bulannya Rp1.042.750.00
5	Jawa Barat	8.156.000	(40.780)	8.115.220	TGR An. Sumi Rahayu pada satker Kanwil Jawa Barat sebesar Rp1.200.000.00 dan Triana Aryati Bc.Ip pada satker LP Wanita Bandung sebesar Rp3.408.000.00.
6	Jambi	44.900.000	(224.500)	44.675.500	
7	Kalimantan Barat	11.500.000	(57.500)	11.442.500	TGR An. Marhaen Hary Prasetyo pada satker Kanim Entikong. Pegawai bersangkutan telah diberhentikan dengan tidak hormat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
8	Sulawesi Tenggara	1.949.000	(9.745)	1.939.255	TP/TGR atas nama Natalis Sp., SH pada satker Kanwil Sulawesi Tenggara
9	NTT	144.475.000	(722.375)	143.752.625	1. An. I Gusti Kadek Susila pada Kanim Kupang sebesar Rp178.530.000.00; 2. An. Servas Pancrasius Suni pada Kanim Atambua sebesar Rp115.770.000.00; 3. An. Walpen Spayung. SH pada Kanim Atambua sebesar Rp10.700.000.00; 4. An. Ferizal. S.Sos pada Kanim Maumere sebesar Rp13.300.000.00
10	Bengkulu	681.010.925	(3.405.055)	677.605.870	Merupakan reklasifikasi tagihan TP/TGR pegawai atas nama :

					a.Darmono Rp159.467.973.00 b.Sukidarfi Rp44.800.000.00 c.PPK LP Bengkulu Rp34.261.760.00 d.Lukman Effendi Rp411.511.440.00
11	Maluku Utara	423.209.240	(2.116.046)	421.093.194	
Total		1.512.747.503	(77.474.849)	1.435.272.654	

Aset Tak Berwujud

C.2.3.4 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak berwujud pada Kemenkumham per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp288.291.861.880,00 sedangkan periode 31 Desember 2011 sebesar Rp239.237.022.128,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp49.054.839.752,00 atau 20,50 persen.

Tabel 59. Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2012 dan 2011

Eselon I	Per 31 Des 2012	Per 31 Des 2011	Kenaikan / (penurunan)
Sekretariat Jenderal	Rp 6.430.596.982	Rp 1.370.034.732	Rp 5.060.562.250
Inspektorat Jenderal	Rp 893.937.000	Rp -	Rp 893.937.000
Ditjen AHU	Rp 10.024.122.962	Rp 8.153.737.962	Rp 1.870.385.000
Ditjen Pemasyarakatan	Rp 1.166.565.410	Rp 572.265.000	Rp 594.300.410
Ditjen Imigrasi	Rp 259.923.070.494	Rp 220.984.827.402	Rp 38.938.243.092
Ditjen HKI	Rp 9.463.790.832	Rp 7.790.463.032	Rp 1.673.327.800
Ditjen PP	Rp 129.498.500	Rp 129.498.500	Rp -
Ditjen HAM	Rp 171.955.200	Rp 175.602.000	Rp (3.646.800)
BPHN	Rp -	Rp -	Rp -
Balitbang HAM	Rp 37.731.000	Rp 10.000.000	Rp 27.731.000
BPSDM	Rp 50.593.500	Rp 50.593.500	Rp -
Jumlah	Rp 288.291.861.880	Rp 239.237.022.128	Rp 49.054.839.752

C.2.3.5 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Kemenkumham per 31 Desember 2012 terdiri dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi pemerintahan yaitu sebesar Rp64.318.557.468,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 60. Perbandingan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2012 dan 2011

Eselon I	Per 31 Des 2012	Per 31 Des 2011	Kenaikan / (penurunan)
Sekretariat Jenderal	Rp 58.455.510.064	Rp 25.132.395.355	Rp 33.323.114.709
Inspektorat Jenderal	Rp 168.348.000	Rp -	Rp 168.348.000
Ditjen AHU	Rp 550.538.309	Rp 853.483.645	Rp (302.945.336)
Ditjen Pemasarakatan	Rp 513.946.888	Rp 569.946.888	Rp (56.000.000)
Ditjen Imigrasi	Rp 146.908.000	Rp 407.535.000	Rp (260.627.000)
Ditjen HKI	Rp 1.305.406.000	Rp 213.496.000	Rp 1.091.910.000
Ditjen PP	Rp 607.906.000	Rp 607.777.000	Rp 129.000
Ditjen HAM	Rp 636.689.750	Rp 129.266.400	Rp 507.423.350
BPHN	Rp 1.076.604.771	Rp 553.052.027	Rp 523.552.744
Balitbang HAM	Rp -	Rp -	Rp -
BPSDM	Rp 856.699.686	Rp 485.979.000	Rp 370.720.686
Jumlah	Rp 64.318.557.468	Rp 28.952.931.315	Rp 35.365.626.153

Kewajiban**C.2.4 KEWAJIBAN****C.2.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga****Utang Kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan utang yang timbul akibat adanya operasional kegiatan satker di lingkungan Kemenkumham dimana haknya sudah diterima Kemenkumham tetapi belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal Neraca. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Kemenkumham per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp53.795.140.417,00. Sedangkan periode 31 Desember 2011 sebesar Rp11.601.007.436,00 atau meningkat sebesar Rp42.194.132.981,00 atau 363,71 persen. Berikut adalah Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Satuan Kerja di Lingkungan Kemenkumham dan Utang Kepada Pihak Ketiga berdasarkan jenisnya:

Tabel 61. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

<i>Uraian Eselon I / Kanwil</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uraian Eselon I / Kanwil2</i>	<i>Saldo2</i>
Sekretariat Jenderal	2.895.112.540	Kepulauan Riau	237.340.363
Inspektorat Jenderal	19.162.565	Lampung	769.638.077
Ditjen AHU	159.547.500	Maluku	24.776.174
Ditjen HKI	10.012.407	Maluku Utara	5.450.700
Ditjen PAS	229.636.541	NTB	211.049.736
BPSDM	104.672.637	NTT	1.759.647.676
Aceh	18.989.625	Papua	382.058.947
DKI Jakarta	7.345.946.373	Papua Barat	82.917.650
Bali	252.003.631	Riau	2.601.197.562
Bangka Belitung	670.161.527	Sulawesi Barat	-
Banten	3.412.991.898	Sulawesi Selatan	1.861.685.208
Bengkulu	1.098.889.123	Sulawesi Tengah	817.993.841
Jambi	2.823.946.142	Sulawesi Tenggara	1.174.117.080
Jawa Barat	4.130.189.250	Sulawesi Utara	15.129.362
Jawa Tengah	1.793.771.670	Sumatera Barat	1.558.811.251
Jawa Timur	6.789.798.817	Sumatera Selatan	954.469.053
Kalimantan Barat	1.453.098.825	Sumatera Utara	3.959.877.049
Kalimantan Selatan	3.257.171.062	Yogyakarta	118.773.764
Kalimantan Tengah	474.197.428	Ditjen Imigrasi	208.077.450
Kalimantan Timur	112.829.911	Gorontalo	2
Jumlah	37.052.129.472	Jumlah	16.743.010.945
Total	53.795.140.417		

Rincian utang kepada pihak ketiga di lingkungan Kemenkumham berdasarkan Jenis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 62. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Jenis

Kode Akun	Uraian Akun	Saldo per 31 Desember 2012 (Rp)
212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	3.840.245.129.00
212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	32.015.596.563.00
212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	2.378.105.000.00
212115	Belanja bansos yang masih harus dibayar	(1.376.597.00)
212121	Utang kepada pihak ketiga BLU	-
212191	Utang kepada pihak ketiga lainnya	15.562.570.322.00
2121	Utang kepada pihak ketiga	53.795.140.417.00

Pendapatan Diterima Dimuka

C.2.4.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan diterima dimuka Kemenkumham per 30 Desember 2012 adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan per 31 Desember 2011 saldo Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp60.618.001.500,00.

Uang Muka Dari KPPN

C.2.4.3 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka KPPN Kemenkumham per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp4.905.638.455,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.517.872.150,00 atau meningkat sebesar Rp2.387.766.305,00 atau 94,83 persen. Uang Muka dari KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Berikut adalah rincian Uang Muka KPPN dan status penyelesaiannya:

Tabel 63. Rincian Uang Muka dari KPPN

No	Kanwil/Eselon I	Saldo	Keterangan
1.	Ditjen Imigrasi	3.477.949.427	Merupakan pengembalian sisa TU TA 2012 dengan rincian sebagai berikut : - TU PNB sebesa Rp434.979.591 yang telah disetor ke Kas Negara tanggal 3 Januari 2013 NTPN 0004061015060604; - TU RM sebesa Rp2.700.000.000 yang telah disetor ke Kas Negara tanggal 10 Januari 2013 NTPN 0804061503020000; - TU RM sebesa Rp342.969.836 yang telah disetor ke Kas Negara tanggal 4 Januari 2013 NTPN 0411020215101004.
2.	Ditjen PP	30.714.159	Merupakan sisa TUP TA 2012 telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 2 Januari 2013.
3.	DKI	2.972.000	Merupakan Sisa UP dan TUP 2012 pada Rupbasan Jakarta Barat sebesa Rp2.972.000.00 dan Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Rp200.000.000.00. Sisa kas sebesa Rp2.972.000.00 tersebut telah disetor ke Kas Negara sedangkan sisa kas di RS Cipinang dikoreksi karena adanya kelebihan catat.
4.	Jawa Barat	37.729	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Rupbasan

			Cirebon. Telah disetor ke Kas Negara tanggal 2 Januari 2013.
5.	Jawa Timur	16.670	Merupakan sisa UP TA 2012 pada satker Kanwil Jawa Timur. Telah disetor ke Kas Negara tanggal 4 Januari 2013.
6.	Nanggroe Aceh Darussalam	50.000	Merupakan Sisa Kas tahun 2010 karena adanya kesalahan operator dalam penginputan terhadap posisi kas. Saldo tersebut sudah disetorkan ke kas negara. dengan NTPN : 1106100915050614 pada tanggal 22 Januari 2013
7.	Sumatera Barat	3.450	Merupakan pengembalian UP TA 2012 sebesar Rp3.450.00 dan telah disetor ke Kas Negara tanggal 02 Januari 2013 dengan No NTPN 0707061408050405
8.	Riau	26.551.000	Merupakan sisa Uang Persediaan TA 2012 dengan rincian sebagai berikut : - Rutan Rengat sebesar Rp25.251.000.00 dan telah disetor ke Kas Negara tanggal 7 Januari 2013 NTPN 0007040105060510 - Kanim Dumai sebesar Rp1.300.000.00 telah disetor ke Kas Negara tanggal 5 Januari 2013 NTPN 0610040104091513
9.	Kepri	8.676.300	Merupakan Sisa TUP 2012 pada Kanim Tarempa Sebesar .. Rp8.676.300.00. Sisa TUP tersebut telah disetorkan ke Kas Negara (NTPN 0103090812120805. NTB 000000405864 Tanggal 04-01-2013);
10.	Sulawesi Selatan	145.000	Merupakan sisa kas anggaran 2012 pada satker LP Narkotika Sungguminasa sebesar .145.000.00 yang berasal dari SP2D GU dan telah disetor Kas Negara.
11.	Sulawesi Utara	12.990.000	Merupakan sisa dari dana TUP Desember 2012 yang terlambat disetorkan pada akhir Desember 2012 pada satker Kanwil Sulawesi Utara dikarenakan bendahara sakit. Sisa kas tersebut baru bisa disetorkan pada tanggal 4 Januari 2013
12.	Nusa Tenggara Timur	185.164	Merupakan sisa uang persediaan TA 2012 dengan rincian sebagai berikut: - Lapas Kupang :Rp7.511.00. disetor ke Kas Negara tanggal 2 Januari 2013 NTPN 0511010306070001; - LP Wanita Kupang Rp380.00. disetor ke Kas Negara tanggal 2 Januari 2013 NTPN 0113110113031210; - Rutan Maumere Rp177.269.00. disetor ke Kas Negara 8 Januari 2013 NTPN 0609000102120816
13.	Papua	2.679.031	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Kanim Jayapura sebesar Rp340.100.00 telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 2 Januari 2013 NTPN 1501150101000915 dan tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp2.338.931.00 NTPN 0612000705050611.
14.	Papua Barat	95.643.145	Merupakan sisa UP pada satker Rupbasan Manokwari sebesar Rp95.643.145.00 telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 4 Januari 2013.
15.	Kalimantan Barat	1.475.195	Merupakan sisa UP pada satker Rutan Sambas sebesar Rp1.378.180.00 dan Rupbasan Singkawang sebesar Rp97.015.00. Seluruhnya telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 4 Januari 2013.
16.	Nusa Tenggara Barat	973	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Rutan BIMA yang telah disetorkan ke Kas Negara

			tanggal 2 Januari 2013. NTPN 9031330106060910
17.	Bali	124.615.964	Merupakan sisa Uang Persediaan TA 2012 pada Kanwil Bali yang telah disetorkan pada Kas Negara tanggal 4 Januari 2013 NTPN 1304041108091310 sebesar Rp78.385.485.00 dan pada tanggal 8 Januari 2013 NTPN 503090311000504 sebesar Rp46.230.479.00.
18.	Kalimantan Tengah	35.000.000	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Rutan Kuala Kapuas yang telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 2013. NTPN 02040908050601
19.	Kalimantan Timur	85.000	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Rutan Samarinda yang telah disetorkan ke Kas Negara 2013
20.	Maluku	50.000.000	Merupakan sisa UP TA 2012 pada Rutan Masohi dan telah disetorkan ke Kas Negara tanggal TA 2013
21.	Sulawesi Tenggara	96.113.400	Merupakan sisa uang tunai TA 2012 dengan rincian sebagai berikut: - Bapas Kendari : Rp2.436.840.00. disetor ke Kas Negara tanggal 4 Januari 2013 NTPN 1100140902141410; - Kanwil Sultra : Rp82.643.040.00. disetor ke Kas Negara tanggal 4 Januari 2013 NTPN 1306141202120708; - Rutan Kendari : .20.00. disetor ke Kas Negara tanggal 7 Januari 2013 NTPN 1111020613000204; - Bapas Bau-Bau : Rp11.033.500.00. disetor ke Kas Negara tanggal 7 Januari 2013 NTPN 0705031412141505.
22.	Sumatera Selatan	34.641.848	Merupakan sisa Uang Persediaan TA 2012 dengan rincian sebagai berikut : - Lapas Wanita Palembang sebesar Rp16.623.000.00 dan telah disetor ke Kas Negara tanggal 11 Januari 2013 dengan NTPN 0203020913060112 - Lapas Lubuk Linggau sebesar Rp15.641.097.00 telah disetor ke Kas Negara tanggal 4 Januari 2013 Merupakan sisa UP dan TUP TA 2012 pada Kanim Muara Enim dengan rincian sebagai berikut : - UP PNBP sebesar Rp1.831.000.00. Sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2013 - UP RM sebesar Rp150.000.00. Sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2013 - UP TUP sebesar Rp396.434.00. Sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2013 NTPN 0313131002101401 Merupakan GU Nihil pada Cabrutan Muaradua sebesar Rp317.00 yang telah disetorkan ke Kas Negara TA 2013
23.	Sumatera Utara	385	Merupakan sisa Uang Persediaan TA 2012 pada Lapas Padang Sidempuan dan telah disetor ke Kas Negara tanggal 5 Januari 2013 NTPN 1406081511061010
25.	Atase Imigrasi	905.092.615	
Jumlah		4.905.638.455	

**Penadptan
Yang
Ditangguhkan**

C.2.4.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan Kemenkumham per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp11.790.073.012,00, sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp8.108.973.785,00 menurun sebesar Rp3.681.099.227,00 atau 45,40 persen.

Utang Jangka Pendek Lainnya C.2.4.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Kemenkumham per 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan per 31 Desember 2011 saldo utang jangka pendek lainnya sebesar Rp9.578.250,00.

Ekuitas C.2.5 EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar C.2.5.1 Ekuitas Dana Lancar

C.2.5.1.1 Cadangan Piutang

Cadangan Piutang Saldo Cadangan Piutang Kemenkumham periode 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp25.005.268.366,00. Sedangkan periode 31 Desember 2011 sebesar Rp18.512.340.946,00. Meningkat sebesar Rp6.492.927.420,00 atau 35,07 persen. Cadangan piutang Kemenkumham ini merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan C.2.5.1.2 Cadangan Persediaan

Saldo Cadangan Persediaan Kemenkumham periode 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp324.101.005.634,00. Sedangkan periode 31 Desember 2011 sebesar Rp274.318.672.069,00. Meningkat sebesar Rp49.782.333.565,00 atau 18,14 persen. Cadangan persediaan Kemenkumham merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek C.2.5.1.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek

Saldo Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Kemenkumham periode 31 Desember 2012 adalah sebesar minus Rp53.001.421.876,00. Sedangkan periode 31 Desember 2011 sebesar minus Rp11.123.695.116,00 meningkat sebesar Rp41.877.726.760,00 atau 376,47 persen. Akun tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Lancar Lainnya C.2.5.1.4 Ekuitas Dana Lancar Lainnya

Saldo Dana Lancar Lainnya Kemenkumham periode 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp13.638.206.727,00. Sedangkan periode 31 Desember 2011 sebesar Rp189.916.707,00. Meningkat sebesar Rp13.448.290.020,00 atau 7081,15 persen.

Brg/Jasa Yang Masih Harus Diterima C.2.5.1.5 Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima

Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima merupakan pengakuan kewajiban oleh pihak ketiga kepada Kemenkumham akibat dari belanja yang sudah direalisasikan oleh Kemenkumham sementara barang/jasa belum diterima.

Brg/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan	C.2.5.1.6. Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan merupakan pengakuan kewajiban atas pendapatan yang sudah diterima oleh Kemenkumham namun barang/jasa belum diserahkan kepada pemohon pelayanan.
Ekuitas Dana Investasi	C.2.6 Ekuitas Dana Investasi C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Saldo Dana Diinvestasikan dalam Aset Tetap Kemenkumham periode 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp20.619.401.370.243,00. Sedangkan periode 31 Desember 2011 sebesar Rp18.286.914.269.929,00. Meningkat sebesar Rp2.332.487.100.314,00 atau 12,75 persen. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Saldo Dana Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Kemenkumham periode 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp354.045.692.002,00. Sedangkan periode 31 Desember 2011 sebesar Rp268.613.517.492,00. Meningkat sebesar Rp85.432.174.510,00 atau 31,80 persen. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Aset Lainnya.
Pengungkapan Penting Lainnya	D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.2.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca Pada tanggal 6 Januari 2013 telah terjadi bencana kebakaran pada gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan jaringan komputer, Instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor lainnya yang berakibat terhambatnya pemberian pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah membentuk tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut dan melaksanakan instruksi Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. D.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.KU.05.01-185 tanggal 18 Desember 2012 Tentang Penyajian Aset dan Kewajiban Dalam Neraca Berdasarkan Basis Akrua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan basis akrua secara bertahap. Untuk laporan keuangan TA 2012 ini dibatasi hanya pada akun Pendapatan yang masih harus dibayar (piutang); dan Belanja yang masih harus dibayar (hutang). Sedangkan untuk transaksi dengan akun : Pendapatan Diterima Dimuka dan Belanja Dibayar Dimuka (Uang Muka Belanja) akan dilaksanakan secara bertahap.

D.2.3 Pengungkapan Lain-lain

D.2.3.1 PNBP Fidusia

Pendapatan Hak dan Perijinan (423214) yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dengan menggunakan aplikasi Akuntansi Keuangan hanya mencatat penerimaan yang dipungut secara langsung oleh Satker 409257 (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) melalui transfer.

Sedangkan PNBP yang tidak dicatat dengan menggunakan aplikasi adalah PNBP atas pendapatan yang berasal dari pelayanan jasa hukum di bidang Fidusia, Kenotariatan dan kewarganegaraan yang dipungut oleh masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia, tetapi dicatat dalam kode akun 03 dan dianggap sebagai PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.KU.02.02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan PNBP atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PNBP tersebut tidak dapat dicatat kedalam aplikasi SAKPA dikarenakan disetor menggunakan SSBP dengan kode satker Kantor Wilayah sehingga tidak dapat diinput dalam aplikasi SAKPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sesuai dengan surat BPKP nomor SPM-1086/D2/02/2011 tanggal 21 Desember 2011, BPKP menyampaikan rekomendasi untuk membuat dua login dalam aplikasi SAKPA untuk menampung perkiraan pendapatan dengan kode Eselon I-01 (Sekretariat Jenderal) dan kode eselon 1 -03 (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).

Dengan rekomendasi tersebut, Kantor Wilayah tidak dapat melakukan rekonsiliasi pendapatan dengan KPPN setempat. Sehingga seluruh pendapatan yang berasal dari pendapatan atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D.2.3.2 Hibah

Tahun anggaran 2012 Kementerian Hukum dan HAM memperoleh hibah langsung kas sebesar Rp21.719.416.603,00 dan hibah langsung barang/jasa sebesar Rp2.648.864.788,00. Rincian hibah langsung kas per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 64. Rincian hibah langsung kas per 31 Desember 2012

No	Satker	Donor	Commitment		Pengesahan		
			MTU	Jumlah	Pendapatan	Belanja	. SPHL/SP3I
1	Ditjen Pemasyarakatan	UNICEF	USD	155,899,415	1,299,067,809	1,148,430,000	243096Y
2	Ditjen Pemasyarakatan	AusAID	AUD	100,000,000	3,809,348,794	3,735,745,783	243095Y
3	Kanwil Jawa Tengah	Pemprov Jateng	IDR	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	327297U
4	Lapas Purwakarta	Pemkab Purwakarta	IDR	80,000,000	54,330,000	54,330,000	SPHL-
					25,670,000	25,670,000	SPHL-
5	Lapas Tarakan	Pemkot Tarakan	IDR	100,000,000	65,000,000	65,000,000	SPHL-
					35,000,000	35,000,000	SPHL-
6	Kanwil Jawa Tengah	Pemprov Jateng	IDR	200,000,000	200,000,000	200,000,000	443576Y
7	Kanwil Sumatera Selatan	Pemprov Sumsel	IDR	147,500,000	-16,500,000		669928A
					147,500,000	51,000,000	669930A
						80,000,000	669927A
8	Lapas Lubuk Linggau	Pemkot Lubuk	IDR	100,000,000	100,000,000	100,000,000	852670X
9	Lapas Narkotika Samarinda	Pemprov Kaltim	IDR	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
10	Rutan Samarinda	Pemprov Kaltim	IDR	4,000,000,000	4,000,000,000	511,565,600	157584Z
Jumlah					21,719,416,603	8,006,741,383	36.86

Sedangkan rincian hibah langsung barang/jasa sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 65. Rincian hibah langsung kas per 31 Desember 2012

No	Satker	Donor	Commitment		Bentuk	Nilai	No. MPHLBJS
			MTU	Jumlah	Barang/Jasa/Surat Berharga		
1	Ditjen Pemasyarakatan	ASIA PACIFIC FORUM	IDR	974,100,000	Barang	Rp 974,100,000	236869Y
2	Kanwil Jambi	Pemkab Kerinci	IDR	933,620,000	Barang	Rp 933,620,000	748423X
3	Rudenim Semarang	INTERT ORG MIGRATION	IDR	12,580,000	Barang	Rp 12,580,000	315804U
4	Lapas Narkotika Cirebon	Gereja Bethel Indonesia	IDR	44,500,000	Barang	Rp 44,500,000	382031Y
5	Ditjen HKI	ICITAP	USD	104,947,288	Barang	Rp 104,947,288	949593A
6	Kanim Pati	RAKHA SUKMA	IDR	84,608,500	Barang	Rp 84,608,500	438342U
7	Ditjen HKI	ICITAP	IDR	285,705,000	Barang	Rp 285,705,000	949594A
8	Kanwil Sumatera Utara	Pemkab Humbang Hasudungan	IDR	164,304,000	Barang	Rp 164,304,000	404469X
9	Lapas Narkotika Cirebon	Gereja Bethel Indonesia	IDR	44,500,000.00	Barang	Rp 44,500,000	382031Y
Jumlah						Rp 2,648,864,788	

D.2.3.3 Aset Bersejarah

Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 18 unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 66. Rincian Aset Bersejarah Kemenkumham Tahun 2012

No	Jenis	Jumlah
1	Tugu Peringatan Prasasti	1 unit
2	Alat Kantor	1 unit

3	Alat Rumah Tangga	3 unit
4	Eksakta	13 nit

D.2.3.4 Permasalahan Penatausahaan BMN

Permasalahan Penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi kendala dalam penyusunan Laporan BMN Tahunan Tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan barang persediaan
 - a. Pencatatan barang persediaan secara umum sudah berjalan dengan baik dan melaksanakan opname fisik per akhir periode laporan, namun persediaan khusus berupa beras, dokumen imigrasi, fidusia dan screening HIV masih terdapat kendala seperti:
 - terdapat perbedaan penerapan antara aplikasi persediaan dengan aplikasi e-paspor;
 - terdapat kodifikasi barang persediaan yang digunakan untuk jenis persediaan yang berbeda (barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat), misalnya kodifikasi dokumen imigrasi digunakan untuk fidusia atau lainnya;
 - b. Kurangnya koordinasi antara unit kerja yang mengelola barang persediaan dengan unit penatausahaan BMN.
- 2) Masalah Mata Anggaran Kegiatan (MAK)

Kurangnya pemahaman akan pentingnya konsistensi penggunaan belanja yang sesuai dengan MAK mempengaruhi kesesuaian informasi yang dituangkan dalam neraca, antara lain : Kode MAK yang tersaji dalam RKA-KL belum sesuai dengan kegiatan yang direncanakan satker, namun satker tetap melaksanakan kegiatan.
- 3) Masalah SDM

Kurangnya pembinaan terhadap operator Simak BMN khususnya menyangkut *reward*, sehingga operator kurang mempedulikan dampak yang terjadi jika terjadi kesalahan prosedur;
- 4) Masalah ketepatan waktu pelaporan

Penyusunan laporan BMN yang dilakukan oleh unit penatausahaan BMN masih mengalami kendala antara lain :

 - a. kendala geografis, mengingat sejumlah satker berada di pulau-pulau sehingga memerlukan waktu dan biaya yang tidak kecil;
 - b. penyediaan dokumen sumber, apabila terdapat keterlambatan atau karena kurang lengkapnya data pendukung terkait pelaksanaan kegiatan maka akan

menjadi hambatan bagi operator dalam melakukan perekaman data BMN.

5) Masalah Aplikasi

Berkaitan dengan implementasi aplikasi Simak BMN dan aplikasi persediaan dalam penyusunan Laporan BMN dari tingkat satker, tingkat wilayah sampai dengan tingkat kementerian dalam penerapannya masih menimbulkan masalah di menu pengiriman dan penggabungan.

6) Masalah Verifikasi dan validasi hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP)

Berkaitan dengan verifikasi dan validasi terkait hasil IP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sampai saat ini sudah mengalami perkembangan dengan menurunnya selisih data absolute yaitu 105.981.708.800 dari selisih data sebelumnya 326.456.780.859. Saat ini selisih masih ditelusuri perbedaan data antara DJKN dan Kementerian Hukum dan HAM dengan selalu berkoordinasi antara satker dan KPKNL.

D.2.3.5 Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2012 telah merevisi Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dan Pedoman Penatausahaan BMN serta menyusun Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan HAM sebagai dasar pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan HAM RI.

D.2.3.6 Pengelolaan Gedung Eks Sentra Mulia

Pada tanggal 1 Agustus 2012 telah ditandatangani kesepakatan bersama tentang serah terima gedung Sentra Mulia yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengembalian Tanah dan Penyerahan Gedung Sentra Mulia Hasil Kerjasama Bangun Guna Serah antara PT. Mulia Persada Tata Lestari dengan Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai tindak lanjut rencana penggunaan gedung tersebut dioperasikan oleh Ditjen Imigrasi, sedangkan nantinya rencana penggunaan gedung Ditjen Imigrasi akan digunakan oleh Ditjen HKI, kemudian penggunaan Ditjen HKI akan dilakukan optimalisasi pemanfaatan BMN.

D.2.3.7 Ganti Rugi Bumi dan Bangunan (GRBB) di Pulau Nusakambangan

Telah dilaksanakan serah terima aset pada tahun 2012 terkait dengan pemanfaatan lahan di Pulau Nusakambangan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengoperasian/Penyerahan Barang hasil Ganti Rugi Bumi dan Bangunan (GRBB) dari PT. Holcim Indonesia Tbk – Pabrik Cilacap kepada 7 satuan kerja di Nusakambangan yang antara lain :

- LP Klas II Pasir Putih Nusakambangan
- LP Klas II Permisan Nusakambangan
- LP Klas II Kembang Kuning Nusakambangan

- LP Klas II Narkotika Nusakambangan
- LP Klas II Besi Nusakambangan
- LP Klas I Batu Nusakambangan
- LP Klas II Terbuka Nusakambangan